



**PEMERINTAH
KOTA PALU**

LAPORAN

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PALU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim.

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Penerapan dan pencapaian SPM tahun 2024 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah terutama PD pengampu SPM, instansi vertikal dan stakeholder terkait dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tentunya, laporan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kota Palu Tahun 2024.

Palu, 30 Maret 2025

Wali Kota Palu,



Hadianto Rasyid

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kebijakan Umum	3
1.4. Arah Kebijakan	4
BAB. 2 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	5
2.1. Pengumpulan Data	5
2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan	5
2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan	9
2.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	15
2.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	21
2.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	24
1. Satuan Polisi Pamong Praja	24
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	33
2.1.6. Bidang Urusan Sosial	40
2.2. Perhitungan Kebutuhan dan Pemenuhan Pelayanan dasar	43
2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan	43
2.2.2. Bidang Urusan Kesehatan	49
2.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	59
2.2.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	63
1. Satuan Polisi Pamong Praja	63
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	66
2.2.5. Bidang Urusan Sosial	73
2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	76
2.3.1. Bidang Urusan Pendidikan	76
2.3.2. Bidang Urusan Kesehatan	88
2.3.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	93
2.3.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan	

Masyarakat	95
1. Satuan Polisi Pamong Praja	95
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	97
2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	98
2.4.1. Bidang Urusan Pendidikan	98
2.4.2. Bidang Urusan Kesehatan	102
2.4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	104
2.4.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	107
1. Satuan Polisi Pamong Praja	107
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	109
2.4.5. Bidang Urusan Sosial	110
BAB. 3 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	111
A. Bidang Urusan Pendidikan	111
1. Jenis Pelayanan Dasar	111
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	112
3. Anggaran	112
4. Dukungan Personil	113
5. Hasil Capaian	113
6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	117
B. Bidang Urusan Kesehatan	117
1. Jenis Pelayanan Dasar	118
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	119
3. Anggaran	120
4. Dukungan Personil	120
5. Hasil Capaian	121
6. Permasalahan dan Solusi	124
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	124
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	124
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	125
d. Pelayanan Kesehatan Balita	125
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	126
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	126
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	127
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	127

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	128
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Berat	128
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	129
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	130
C. Urusan Pekerjaan Umum	131
1. Jenis Pelayanan Dasar	131
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	131
3. Anggaran	131
4. Dukungan Personil	132
5. Hasil Capaian	133
6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	135
a. Bidang Air minum Permasalahan	135
b. Pengelolaan Limbah Domestik Permasalahan	135
D. Urusan Perumahan Rakyat	136
1. Jenis Pelayanan Dasar	136
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	136
3. Anggaran	137
4. Dukungan Personil	137
5. Hasil Capaian	138
6. Permasalahan dan Solusi	141
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	
Masyarakat	142
1. Jenis Pelayanan	143
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	143
3. Anggaran	143
4. Dukungan Personil	144
5. Hasil capaian	145
6. Kendala Permasalahan dan Solusi	150
a. Satuan Polisi Pamong Praja Permasalahan	150
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Permasalahan	150
c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
Permasalahan	151

F. Urusan Sosial	152
1. Jenis Pelayanan Dasar	152
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	153
3. Anggaran	153
4. Dukungan Personil	154
5. Hasil Capaian	154
6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	157
BAB. 4 PROGRAM DAN KEGIATAN	159
1. Urusan Pendidikan	159
2. Urusan Kesehatan	160
3. Urusan Pekerjaan Umum	160
4. Urusan Perumahan Rakyat	161
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	161
6. Urusan Sosial	163
BAB. 5 PENUTUP	164

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar	7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7
Tabel 2.5	Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar	8
Tabel 2.6	Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	10
Tabel 2.6	(Lanjutan) Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kota Palu	12
Tabel 2.7	Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	13
Tabel 2.8	Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan	16
Tabel 2.9	Kondisi SPLAD	17
Tabel 2.10	Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan	18
Tabel 2.11	Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/ Kota (< 10 HA) Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	22
Tabel 2.12	Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter di Lokasi Penegakan PERDA dan PERKADA	25
Tabel 2.13	Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda Dan Perkada	25
Tabel 2.14	Rekapitulasi Sop Kegiatan Penegakan PERDA/PERKADA	26
Tabel 2.15	Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP	27
Tabel 2.16	Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)	27
Tabel 2.17	Rekapitulasi PERDA PERKADA Yang Akan Ditegakkan	28
Tabel 2.18	Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter	28
Tabel 2.19	Rekapitulasi Aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radius 0-50 meter.....	29

Tabel 2.20	Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara	31
Tabel 2.21	Format Data Dukung Pelaksanaan SPM	34
Tabel 2.22	Rekapitulasi Relawan Pemadam Kebakaran	37
Tabel 2.23	Rekapitulasi Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran	39
Tabel 2.24	Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gelandangan Pengemi Yang Memerlukan Pelayanan Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga (Berbasis Keluarga/ Masyarakat/ Komunitas)	41
Tabel 2.25	Data Dan Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial Daerah Kota Palu	42
Tabel 2.26	Perhitungan Pemenuhan Pelayanan Dasar	44
Tabel 2.27	Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kota Palu	50
Tabel 2.28	Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Kota Palu	55
Tabel 2.29	Rumah Terlayani SPAM	59
Tabel 2.30	Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	63
Tabel 2.31	Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP	64
Tabel 2.32	Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS	64
Tabel 2.33	Penghitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana SATPOL PP	65
Tabel 2.34	Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	66
Tabel 2.35	Layanan Pelaksanaan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran	67
Tabel 2.36	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan Dan Evakuasi	69
Tabel 2.37	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	70
Tabel 2.38	Layanan Pendataan, Inspeksi Dan Investigasi Pasca Kebakaran.....	71

* Tabel 2.39	Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	73
Tabel 2.40	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	76
Tabel 2.41	Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2024	89
Tabel 2.42	Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Palu Tahun 2024	90
Tabel 2.43	Rencana Pemenuhan Air Minum	93
Tabel 2.44	Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik	94
Tabel 2.45	Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Kerangka Pendanaan	95
Tabel 2.46	Rencana Pemenuhan Personil SATPOL PP	96
Tabel 2.47	Rencana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana	97
Tabel 2.48	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	97
Tabel 2.49	Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan	98
Tabel 2.50	Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	102
Tabel 2.51	Capaian Layanan Air Minum	104
Tabel 2.52	Capaian Layanan Air Limbah Domestik	106
Tabel 2.53	Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara	107
Tabel 2.54	Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Dan Prasarana	108
Tabel 2.55	Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Pemadaman Dan Evakuasi)	109
Tabel 2.56	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran) Kota Palu	109
Tabel 2.57	Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti Kabupaten Kota	110
Tabel 3.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	112

* Tabel 3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	112
Tabel 3.3	Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	113
Tabel 3.4	Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	113
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	114
Tabel 3.6	Realisasi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan	114
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal	115
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan	115
Tabel 3.9	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Urusan Kesehatan	118
Tabel 3.10	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	119
Tabel 3.11	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	120
Tabel 3.12	Kondisi Pegawai Menurut Golongan	120
Tabel 3.13	Konsisi Pegawai Menurut Jabatan	120
Tabel 3.14	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Kesehatan	121
Tabel 3.15	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	121
Tabel 3.16	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	122
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan	123
Tabel 3.18	Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum	131
Tabel 3.19	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	131
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	132
Tabel 3.21	Kondisi Pegawai ASN Menurut Golongan	132
Tabel 3.22	Kondisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan	132
Tabel 3.23	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	133
Tabel 3.24	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	133

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum	134
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	134
Tabel 3.27 Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Perumahan Rakyat.....	136
Tabel 3.28 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	137
Tabel 3.29 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	137
Tabel 3.30 Kondisi Pegawai Menurut Golongan	138
Tabel 3.31 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	138
Tabel 3.32 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	138
Tabel 3.33 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	140
Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	140
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	141
Tabel 3.36 Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	142
Tabel 3.37 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal UrusanKetentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarak.....	143
Tabel 3.38 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	144
Tabel 3.39 Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	144
Tabel 3.40 Kondisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan	145
Tabel 3.41 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	145
Tabel 3.42 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	146
Tabel 3.43 Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	147
Tabel 3.44 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja	147

Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148
Tabel 3.46 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	149
Tabel 3.47 Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Sosial	152
Tabel 3.48 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	153
Tabel 3.49 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial	154
Tabel 3.50 Kondisi Pegawai Menurut Golongan	154
Tabel 3.51 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	154
Tabel 3.52 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	155
Tabel 3.53 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial	156
Tabel 3.54 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial	156
Tabel 4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan	159
Tabel 4.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan	160
Tabel 4.3 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	161
Tabel 4.4 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	161
Tabel 4.5 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban	161
Tabel 4.6 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Sosial	163



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Esensi penyelenggaran otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan daerah. Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah otonom untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Satu satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib.

SPM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, merupakan tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar

dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Palu menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. DASAR HUKUM

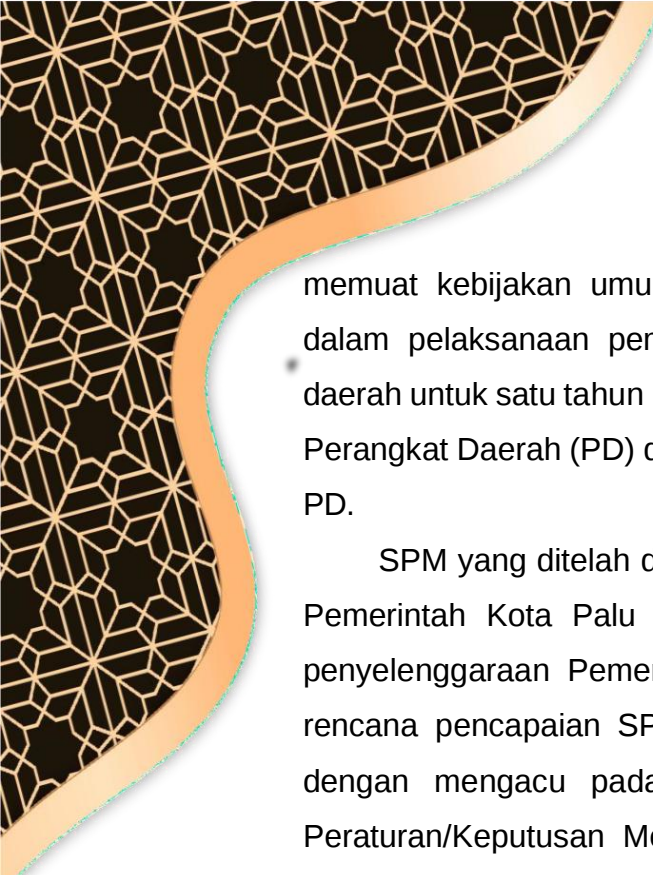
Dasar hukum dalam penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

- 
- Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

1.3. KEBIJAKAN UMUM

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Secara substansial RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD



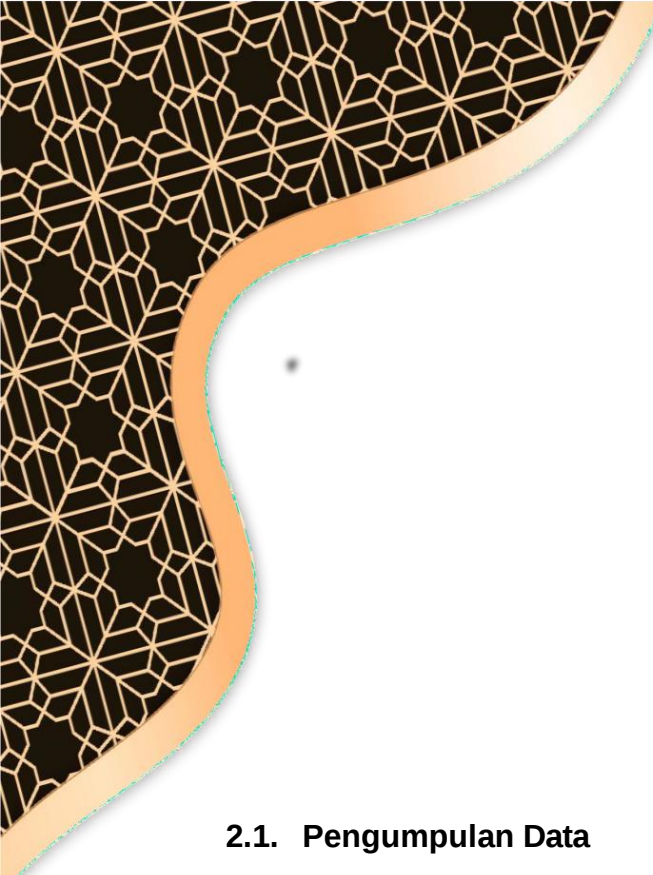
memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Palu untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Palu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kota. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Palu. Program pembangunan daerah Kota Palu tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan program unggulan wali kota dan wakil wali kota sebagai janji kepada masyarakat termasuk penerapan SPM.

1.4. ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



BAB 2

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1. Pengumpulan Data

2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Data yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil pendataan yang dilakukan oleh OPD diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Pengumpulan data untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan melalui berbagai formulir yang mencakup data terkait angka partisipasi, jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas hasil belajar, pemerataan kualitas hasil belajar, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan kualitas lingkungan belajar

Tabel 2.1
Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Angka Partisipasi Murni (Apm) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/Sederajat		Angka Partisipasi Kasar (Apk) Sd/Mi/Paket A		Angka Partisipasi Kasar (Apk) Smp/Mts/Paket B.		Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 15tahun	
		Peserta Didik Usia 5-6 Tahun Yang Mengikuti Paud Formal Dan Nonformal	Jumlah Populasi Anak Usia5-6 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang Sd/Mi/ Paket A	Jumlah Anak Usia 7 - 12 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Yang Bersekolah Dijenjang Smp/Mts/ Paket B	Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Usia 7 - 15 Tahun Yang Bersekolah	Jumlah Anak Usia 7 - 15 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/KB/ SPS/TPA)	10.108	14.559						
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/MTS/ Kesetaraan)			41.070	40.832	20.767	20.259	61.837	61.091

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.2
Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kecukupan Formasi Guru ASN Untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh PEMDA Sesuai Dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)		Proporsi Lulusan Program Guru Penggerak yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas/Penilik (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)		Indeks Distribusi Guru (SD/SMP/Kesetaraan)	
		Jumlah Formasi Guru ASN yang Diajukan	Jumlah Formasi Guru ASN yang Dibutuhkan Berdasarkan Data dari Kemendikbudristek	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak di Kota yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak	Indeks Distribusi Guru Tahun N	Indeks Distribusi Guru Tahun N-1
1	Pendidikan Anak Usia Dini	38	1	1	8	0,95	0,65
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)						

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualitas Literasi Peserta Didik (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)		Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)	
		Rata-rata Nilai Literasi Tahun N Semua Peserta Asesmen nasional Dikurangi Rata-rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-rata Nilai LiterasiTahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi rata-rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional
1	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)	7,19	61,885	17,225	41,625

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.4
Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Peningkatan Proporsi Jumlah satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Pertumbuhan Pendidik PAUD Dengan S1/DIV		Rasio pengawas Sekolah Untuk PAUD	
		Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Akreditasi Minimal B	Jumlah Keseluruhan Satuan PAUD yang Telah Diakreditasi	Persentase Pendidik PAUD Dengan S1/DIV pada Tahun N	Persentase Pendidik PAUD Dengan S1/DIV pada Tahun N-1	Jumlah Pengawad Sekolah Untuk TK Ditambah Jumlah Penilik PAUD Nonformal	Jumlah Satuan PAUD
1	Pendidikan Anak Usia Dini	115	248	78,15	72,43	20	248

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.5
Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)		Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas di Satuan Pendidikan (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)	
		Indeks Iklim Keamanan Rata-rata Satuan Pendidikan pada Tahun N	Indeks Iklim Keamanan Rata-rata Satuan Pendidikan pada Tahun N berdasarkan Asesmen Nasional	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Rata-rata Satuan Pendidikan pada Tahun N	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Rata-rata Satuan Pendidikan pada Tahun N Berdasarkan Asesmen Nasional
1	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/ Kesetaraan)	70,21	67,90	73,33	68,53

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Tahap pengumpulan data dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan meliputi:

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.
2. Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data sasaran dilakukan melalui penentuan sasaran sesuai dengan indikator layanan dasar. Data sasaran meliputi sasaran pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 12 indikator SPM Kesehatan dan disusun sesuai dengan kemampuan pemberi layanan yang sesuai dengan ketentuan kriteria yang ada dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Untuk urusan kesehatan dalam pengumpulan data dilaksanakan sebagaimana dalam Form 2.A.2 dan Form 2.A.3 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

No *	Kecamatan / Kelurahan	Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi Baru Lahir	Balita	Usia Pendidikan Dasar	Usia Produktif	Usia Lanjut	Hipertensi	Diebetes melitus	ODGJ
I PALU TIMUR											
1	Besusu Barat	220	220	210	1.068	1.756	7.394	895	2.014	181	23
2	Besusu Tengah	124	124	118	600	1.068	4.143	582	1.148	103	13
3	Besusu Timur	141	141	135	686	1.135	4.686	692	1.307	117	15
4	Lolu Selatan	218	218	207	1.056	1.719	7.279	1.040	2.022	181	23
5	Lolu Utara	176	176	167	852	1.422	5.834	932	1.644	146	19
II PALU BARAT											
1	Ujuna	160	160	152	777	1.403	5.132	809	1.444	130	17
2	Balaroa	225	225	215	1.093	2.024	7.278	848	1.975	177	24
3	Kamonji	147	147	140	715	1.226	4.868	689	1.350	121	16
4	Baru	96	96	93	472	729	3.174	511	895	80	10
5	Lere	204	204	194	991	1.601	6.733	929	1.862	167	22
6	Siranindi	100	100	95	483	807	3.292	500	921	83	11
III PALU SELATAN											
1	Tatura Utara	347	347	330	1.683	2.634	11.574	1.618	3.206	288	37
2	Birobuli Utara	377	377	359	1.828	2.787	12.759	1.771	3.531	317	40
3	Petobo	245	245	233	1.188	1.880	8.224	758	2.183	196	26
4	Birobuli Selatan	240	240	229	1.165	1.787	8.206	1.060	2.252	202	26
5	Tatura Selatan	213	213	203	1.033	1.546	7.158	1.016	1.986	178	23
IV PALU UTARA											
1	Mamboro	157	157	150	763	1.260	5.179	559	1.394	125	17
2	Taipa	123	123	117	596	998	4.095	397	1.092	98	13
3	Kayumalue Ngapa	65	65	62	316	686	2.890	352	787	71	9
4	Kayumalue Pajeko	86	86	82	419	495	2.216	266	603	54	7
5	Mamboro Barat	71	71	68	345	578	2.371	268	641	58	8
V ULUJADI											
1	Buluri	80	80	76	389	762	2.548	188	665	60	9
2	Donggala Kodi	199	199	190	965	1.535	6.708	811	1.827	164	21
3	Kabonena	165	165	157	801	1.438	5.449	468	1.438	129	18
4	Silae	139	139	132	675	1.199	4.587	464	1.227	110	15
5	Watusampu	59	59	56	284	524	1.889	166	499	45	6

No	Kecamatan / Kelurahan	Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi Baru Lahir	Balita	Usia Pendidikan Dasar	Usia Produktif	Usia Lanjut	Hipertensi	Diebetes melitus	ODGJ
6	Tipo	87	87	83	423	708	2.917	287	779	70	9
VI	TATANGA										
1	Nunu	186	186	177	901	1.533	6.231	687	1.681	151	20
2	Palupi	198	198	189	963	1.444	7.037	708	1.882	169	21
3	Tavanjuka	105	105	100	510	810	3.565	403	964	87	11
4	Pengawu	175	175	167	850	1.422	5.826	608	1.563	140	19
5	Duyu	236	236	225	1.147	2.076	7.866	708	2.084	187	25
6	Boyaoge	175	175	166	848	1.516	5.719	689	1.557	140	19
VII	TAWAELI										
1	Pantoloan	111	111	106	540	877	3.699	446	1.007	90	12
2	Pantoloan Boya	83	83	78	396	682	2.662	289	718	64	9
3	Baiya	113	113	106	538	910	3.695	392	993	89	12
4	Lambara	78	78	74	378	638	2.557	318	699	63	8
5	Panawu	83	83	79	402	637	2.776	379	766	69	9
VII	MANTIKULORE										
1	Layana Indah	93	93	89	451	746	3.083	318	826	74	10
2	Tondo	359	359	342	1.744	2.724	12.397	1.224	3.310	297	38
3	Talise	290	290	276	1.406	2.344	9.710	1.220	2.656	237	31
4	Tanamodindi	273	273	259	1.322	2.140	9.014	1.179	2.477	222	29
5	Lasoani	248	248	236	1.202	1.834	8.458	882	2.270	204	26
6	Poboya	88	88	84	430	722	2.973	216	775	70	9
7	Kawatuna	119	119	112	578	1.017	3.921	393	1.048	94	13
8	Talise Valangguni	157	157	149	760	1.312	5.258	435	1.383	124	17
JUMLAH		7.634	7.634	7.267	37.032	61.091	255.030	30.370	69.351	6.222	815

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kota Palu

No.	Nama Puskesmas	Orang Terduga TB	Orang Beresiko HIV
1	Pantoloan	454	392
2	Tawaeli	529	401
3	Mamboro	410	443
4	Talise	923	1537
5	Kawatuna	637	893
6	Singgani	599	769
7	Birobuli	837	1407
8	Bulili	568	1118
9	Mabelopura	734	681
10	Nosarara	567	581
11	Sangurara	848	1150
12	Kamonji	837	628
13	Lere	767	608
14	Tipo	432	311
Jumlah		9.142	10.919

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.7
Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan		SDM Kesehatan	
		Fasilitas	Ketersediaan	Jenis	Ketersediaan
1	Tawaeli	Puskesmas	2	Dokter	10
		Puskesmas Pembantu	4	Bidan	32
		Poskesdes	5	Perawat	32
		Posyandu	22	Ahli Gizi	2
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	2	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	206
2	Palu Utara	Puskesmas	1	Dokter	5
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	19
		Poskesdes	3	Perawat	14
		Posyandu	13	Ahli Gizi	0
		Rumah Sakit	1	Tenaga Kesehatan Masyarakat	5
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	10	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	65
3	Mantikulore	Puskesmas	2	Dokter	12
		Puskesmas Pembantu	8	Bidan	48
		Poskesdes	9	Perawat	31
		Posyandu	41	Ahli Gizi	4
		Rumah Sakit	4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	15
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	23	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	246
6	Palu Timur	Puskesmas Singgani	1	Dokter	6
		Puskesmas Pembantu	0	Bidan	15
		Poskesdes	3	Perawat	12
		Posyandu	16	Ahli Gizi	1
		Rumah Sakit	3	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	25	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	80
5	Palu Selatan	Puskesmas	3	Dokter	18
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	57
		Poskesdes	9	Perawat	49

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan		SDM Kesehatan	
		Fasilitas	Ketersediaan	Jenis	Ketersediaan
6	Tatanga	Posyandu	43	Ahli Gizi	8
		Rumah Sakit	4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	26
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	22	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	242
		Puskesmas	2	Dokter	12
		Puskesmas Pembantu	5	Bidan	43
		Poskesdes	8	Perawat	27
		Posyandu	37	Ahli Gizi	6
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20
7	Palu Barat	Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	14	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	224
		Puskesmas	2	Dokter	8
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	26
		Poskesdes	6	Perawat	22
		Posyandu	32	Ahli Gizi	4
		Rumah Sakit	2	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	6	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	112
8	Ulujadi	Puskesmas	1	Dokter	6
		Puskesmas Pembantu	3	Bidan	11
		Poskesdes	3	Perawat	10
		Posyandu	14	Ahli Gizi	3
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	1	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	98
Jumlah		421		1921	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum, Pemerintah Kota Palu berusaha untuk selalu meningkatkan perluasan sistem penyediaan air minum dengan mengendalikan kualitas dan kuantitas air serta tekanan air, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air minum yang layak. Data air baku dan produksi air minum di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Unit Air Baku			Unit Produksi			
			Jenis Sumber Air	Nama Sumber	Lokasi Unit Air Baku	Kapasitas Intake (Liter/Detik)	Kapasitas Unit Produksi (Liter/Detik)	Idle Capacity (Liter/Detik)	PDAM/UPTD/Badan usaha/KPSPAM
1	PALU TIMUR								
2	PALU BARAT								
3	PALU SELATAN								
4	PALU UTARA								
5	ULUJADI								
	- SPAM WATUSAMPU	Watusampu	Sungai	Sungai Watusampu	Kel. Watusampu	10 l/det	9 l/det	10 l/detik	KP SPAM
	- SPAM ULUJADI	Silae	Sungai	Sungai Valimaya	Kel. Tipo	20 l/det	9 l/det	10 l/detik	KP SPAM
		Tipo							
		Buluri							
6	TATANGA								
7	TAWAELI								
8	MANTIKULORE								
	- SPAM LAYANA	Layana	Sungai	Sungai Layana	Kel. Layana	10 l/det	7 l/det	3 l/detik	KP SPAM
	- SPAM POBOYA	Tondo	Sungai	Sungai Poboya	Kel. Poboya	60 l/det	20 l/det	40 l/detik	PDAM
		Talise Valangguni							
		Lasoani							
		Layana							
		Poboya							
	- SPAM WATUTELA	Tondo	Sungai	Sungai Poboya	Kel. Tondo	30 l/det	10 l/det	20 l/detik	PDAM
	- SPAM KAWATUNA	Kawatuna	Sungai	Sungai Kawatuna	Kel. Kawatuna	25 l/det	10 l/det	15 l/detik	PDAM
JUMLAH						155 L/detik	65 L/detik	90 L/detik	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.9
Kondisi SPLAD

No	Nama SPALD	Lokasi SPALD	Kondisi SPALD Regional (Beroperasi/Tidak Beroperasi)	Wilayah Pelayanan		Akses			
				Kecamatan	Kelurahan	Tersedia		Termanfaatkan	
						M3/hari	KK	M3/hari	KK
1	UPTD IPLT	Kel. Talise	Beroperasi	Mantikulare	Kel. Talise	25	20	15	10

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.10
Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan

Kecamatan	Kelurahan	Unit Air Baku			Unit Produksi			Unit Pelayanan	Kondisi		
		Jenis Sumber Air	Nama Sumber	Lokasi Unit Air Baku	Kapasitas Intake (Liter/Detik)	Kapasitas Unit Produksi (Liter/Detik)	Idle Capacity (Liter/Detik)	PDAM/UPTD/ Badan Usaha/ KPSPAM	Beroperasi	Kuantitas	Kualitas
Palu barat	Balaroa	Air Tanah			10 Liter/Detik	10 Liter/Detik			Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
	Baru	Air Tanah							Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
	Kamonji	Air Tanah							Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
	Lere	Air Tanah							Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
	Siranindi	Air Tanah							Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
	Ujuna	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi
Ulujadi	Buluri	Air Permukaan	Sungai Buluri	Kec. Ulujadi	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM		Terpenuhi	Terpenuhi
	Donggala Kodi	Air Permukaan	Sungai Denggune	Kec. Ulujadi	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
	Kabonena	Mata Air						KP SPAM		Terpenuhi	Terpenuhi
	Silae	Air Permukaan	Sungai Buluri	Kec. Ulujadi	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM			
	Tipo	Air Permukaan	Sungai Buluri	Kec. Ulujadi	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM			
	Watusampu	Air Permukaan	Sungai Watusampu	Kec. Ulujadi	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM			
Tatanga	Duyu	Air Permukaan	Sungai Sombe Lewara	Kec. Tatanga	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM			
	Pengawu	Air Permukaan	Sungai Sombe Lewara	Kec. Tatanga	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik		KP SPAM			
	Palupi	Air Tanah									
	Tavanjuka	Air Tanah									
	Nunu	Air Tanah									
	Boyaoge	Air Tanah									

Kecamatan	Kelurahan	Unit Air Baku			Unit Produksi			Unit Pelayanan	Kondisi		
		Jenis Sumber Air	Nama Sumber	Lokasi Unit Air Baku	Kapasitas Intake (Liter/Detik)	Kapasitas Unit Produksi (Liter/Detik)	Idle Capacity (Liter/Detik)	PDAM/UPTD/ Badan Usaha/ KPSPAM	Beroperasi	Kuantitas	Kualitas
Palu Selatan	Birobuli Selatan	Air Tanah									
	Birobuli Utara	Air Tanah									
	Petobo	Air Tanah									
	Tatura Selatan	Air Tanah									
	Tatura Utara	Air Tanah									
Palu Utara	Kayumalue Ngapa	Air Tanah									
	Kayumalue Pajeko	Air Tanah									
	Mamboro	Air Tanah									
	Mamboro Barat	Air Tanah									
	Taipa	Air Tanah									
Tawaeli	Baiya	Air Tanah									
	Lambara	Air Tanah									
	Panau	Air Tanah									
	Pantoloan	Air Permukaan	Sungai Pantoloan Boya	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik					
	Pantoloan Boya	Air Permukaan	Sungai Pantoloan Boya	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik					
Mantikulore	Kawatuna	Air Permukaan	Sungai Kawatuna	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik		PDAM			
	Lasoani	Air Permukaan	Sungai Pooya	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik		PDAM			
	Layana Indah	Air Permukaan	Sungai Wintu	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik		KP SPAM			
	Poboya	Air Permukaan	Sungai Pooya	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik		PDAM			
	Talise	Air Tanah									

Kecamatan	Kelurahan	Unit Air Baku			Unit Produksi			Unit Pelayanan	Kondisi		
		Jenis Sumber Air	Nama Sumber	Lokasi Unit Air Baku	Kapasitas Intake (Liter/Detik)	Kapasitas Unit Produksi (Liter/Detik)	Idle Capacity (Liter/Detik)	PDAM/UPTD/ Badan Usaha/ KPSPAM	Beroperasi	Kuantitas	Kualitas
	Talise Valangguni	Air Permukaan	Sungai Pooya	Kec. Tawaeli	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik		PDAM			
	Tanamodindi	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi
	Tondo	Air Permukaan	Sungai Watutela					PDAM		Terpenuhi	Terpenuhi
Palu Timur	Besusu Barat	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi
	Besusu Timur	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi
	Besusu Tengah	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi
	Lolu Selatan	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi
	Lolu Utara	Air Tanah								Terpenuhi	Terpenuhi

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan tahapan pertama yang dilaksanakan dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM pada bidang urusan perumahan rakyat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan baseline data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat yang terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Data yang berhasil dihimpun pada tahun 2024 terkait pelayanan dasar yaitu data identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota, data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota, serta data identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 Ha).

Adapun hasil pengumpulan data bidang urusan perumahan rakyat untuk pelaksanaan SPM Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.11
Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (< 10 HA) Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

No	Lo asi		Luas Lahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Tingkat Kekumuhan (ringan/sedang/berat)	Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan				
1	Palu Timur	Besusu Barat	1,87		Ringan	
		Besusu Tengah				
		Besusu Timur	3,34		Ringan	
		Lolu Selatan	10,95		Ringan	
		Lolu Utara				
2	Palu Barat	Ujuna	12,53		Ringan	
		Balaroa				
		Kamonji				
		Baru	2,79		Ringan	
		Lere	6,23		Ringan	
3	Palu Selatan	Siranindi				
		Tatura Utara	2,57		Ringan	
		Birobuli Utara				
		Petobo	3,08		Ringan	
		Birobuli Selatan	1,34		Ringan	
4	Palu Utara	Tatura Selatan	3,59		Ringan	
		Mamboro	2,29		Ringan	
		Taipa	8,21		Ringan	
		Kayumalue Ngapa	0,66		Ringan	
		Kayumalue Pajeko				
5	Ulujadi	Mamboro Barat	3,38		Ringan	
		Buluri				
		Donggala Kodi	1,1		Ringan	
		Kabonena	4,87		Ringan	
		Silae	4,21		Ringan	
6	Tatanga	Watusampu				
		Tipo	4,39		Ringan	
		Nunu	7,7		Ringan	
		Palupi	2,25		Ringan	
		Tavanjuka	2,4		Ringan	
		Pengawu	5,47		Ringan	

No	Lo asi		Luas Lahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Tingkat Kekumuhan (ringan/sedang/berat)	Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan				
7	Tawaeli	Duyu	0,77		Ringan	
		Boyaoge	1,06		Ringan	
		Pantoloan	3,57		Ringan	
		Pantoloan Boya	2,45		Ringan	
		Baiya	2,87		Ringan	
		Lambara	1,05		Ringan	
		Panawu	0,61		Ringan	
8	Mantikulore	Layana Indah	1,53		Ringan	
		Tondo	3,98		Ringan	
		Talise	1,17		Ringan	
		Tanamodindi	4,6		Ringan	
		Lasoani	4,89		Ringan	
		Poboya	1,82		Ringan	
		Kawatuna	4,01		Ringan	
		Talise Valangguni	2,74		Ringan	
JUMLAH			132,34	0		

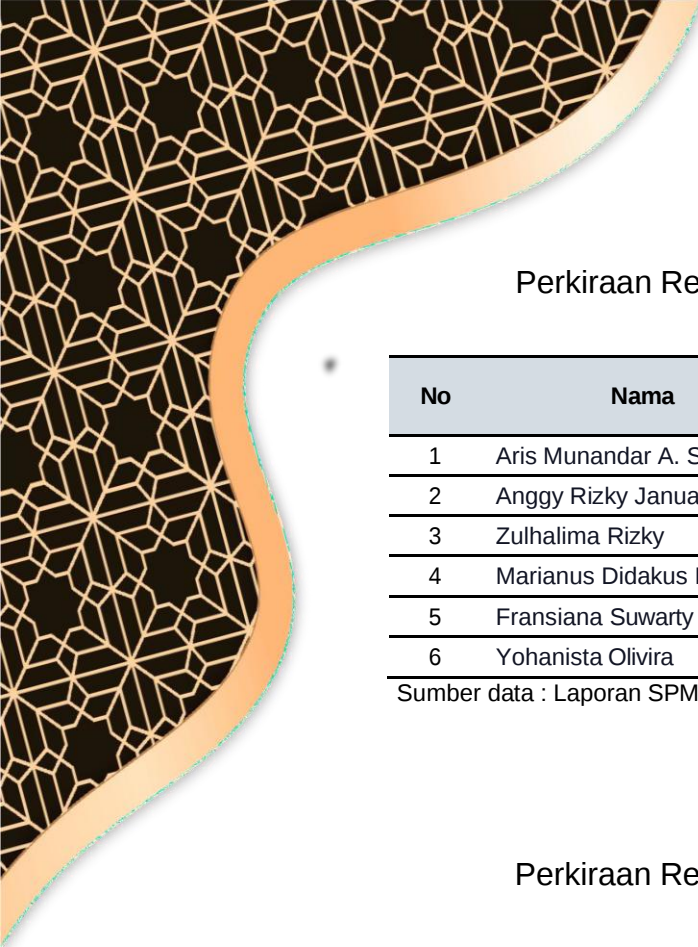
Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024

2.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Pengumpulan data bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap beberapa aspek sasaran, diantaranya perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada, rekapitulasi SOP kegiatan penegakan Perda/Perkada, rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD Satpol PP, rekapitulasi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh OPD Satpol PP (Satpol PP, PPNS, Satlinmas), rekapitulasi perda perkada yang akan ditegakkan, rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan Perda Dan Perkada dalam radius 0-50 meter, rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan Perda dan perkada dalam radius 0-50 meter.

Pengumpulan data terkait informasi warga negara diperoleh dari hasil patroli pelanggaran perda dan perkada sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini



Tabel 2.12
Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter di Lokasi Penegakan PERDA dan PERKADA

No	Nama	NIK	No.KK	Tempat Lahir	Tgl. Lahir	Alamat
1	Aris Munandar A. Suhuni	7271022101950007	7271012804230003	Palu	20 Januari 1995	Jl. Tanjung Satu Irg. Citra No. 41
2	Anggy Rizky Januarista. P	7271015201960013	7271012804230003	Palu	13 Januari 1996	Jl. Tanjung Satu Irg. Citra No. 41
3	Zulhalima Rizky	7271015106190004	7271012804230003	Palu	15 Juni 2016	Jl. Tanjung Satu Irg. Citra No. 41
4	Marianus Didakus Reba	7271031512800007	7271031001170001	Tebuk	15 Desember 1980	Jl. Zebra I A Palu
5	Fransiana Suwarty	5307054211620001	7271031001170001	Maumere	2 November 1982	Jl. Zebra I A Palu
6	Yohanista Olivira	7271036310110003	7271031001170001	Tebuk	23 Oktober 2011	Jl. Zebra I A Palu

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.13
Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda Dan Perkada

No	Jenis Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Jumlah Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Kondisi Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara
1	Rumah Ibadah	760	Baik
2	Sekolah	171	Baik
3	Jembatan	45	Baik
4	Rumah Warga Negara	76.571	Baik
5	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	376.000	Baik

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.14
Rekapitulasi Sop Kegiatan Penegakan PERDA/PERKADA

No.	Standar Operasional Prosedur	Jenis Standar Operasional Prosedur Teknis	Kendala	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah/Perkada	1. Pembongkaran Portal 2. Pengembalian fungsi Trotoar tentang Pembinaan dan Penertiban PKL 3. Penertiban Hewan Ternak 4. Penanganan Gelandangan dan Pengemis 5. Penyelenggaraan Kebersihan	Masih adanya Pelanggar yang tidak membayar sanksi berupa denda	Catatan : SOP sesuai dengan Permendagri No 54 /2011 PERDA PKL No 3 Tahun 2012 Perkada Kota Palu NO. 6 Tahun 2012 Perkada Kota Palu NO. 3 Tahun 2018 Perwali No. 37 Tahun 2017 yang memuat ttg SOP :
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pembinaan dan Penyuluhan)	Sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum	Tidak adanya anggaran yang melekat pada bidang Pembinaan dan Penyuluhan	- Pembinaan dan Penyuluhan - Penaganan Unjuk rasa dan kerusuhan masa
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Melakukan Negosiasi dengan Pengunjuk rasa, Koordinasi terhadap pihak terkait dan Pengamanan Aset dan Pejabat	-	- Pengawasan
4	Pengawasan pejabat/orang-orang penting	Pengawasan dengan sepeda motor dan pengawasan dengan mobil yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan	-	- Patroli
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Pengamanan Rumah Dinas, Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Kota Palu, Tempat kedatangan dan tujuan tamu VIP, Gedung dan Aset Penting Pemerintah Kota Palu, Upacara dan Acara Penting	-	- Penertiban - Pengamanan
6	Operasional patroli	Melakukan Patroli ditempat lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan	-	Deteksi Dini dan Cegah Dini
7	Deteksi Dini dan Cegah Dini	Sosialisasi dan Penyuluhan, Deteksi Dini dan Cegah Dini	Tidak adanya anggaran yang melekat pada bidang Deteksi Dini dan Cegah Dini	

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.15
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
			Layak	Tidak Layak
1	Patroli Bus Microbus	1	1	-
2	Truk	2	2	-
3	Pick Up	5	5	-
4	Sepeda Motor	32	32	-
5	Pph	234	234	-
6	Mini Bus	2	2	-

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.16
Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil SATPOL PP			Jumlah Personil PPNS Dan Satlinmas	
		PNS		Non Pns	PPNS	SATLINMAS
		Belum Diklat	Sudah Diklat			
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27	26	368	1	100

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.17
Rekapitulasi PERDA PERKADA Yang Akan Ditegakkan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Perda dan Perkada	Jumlah Perda Dan Perkada Yang Akan Ditegakkan		Keterangan
			PERDA	PERKADA	
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29	19	10	Mash Berlaku

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.18
Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

No.	Jenis Penerima Layanan	Jumlah Warga Negara (Sampling)	Jumlah Warga Negara Yang Terdampak karena Penegakan Perda Dan Perkada		Jumlah Anggaran Yang Untuk Pelayanan Pengobatan Dan Ganti Rugi Material
			Cidera Ringan	Cidera Sedang Dan/ Atau Berat	
1.	Pelayanan Pengobatan	382.017	0	0	0
2.	Kerusakan Aset	382.017	0	0	0

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.19
Rekapitulasi Aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan Perda dan Perkada
dalam radius 0-50 meter

No	Jumlah Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Jumlah Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara Yang Mengalami Kerusakan			Jumlah Anggaran Yang Untuk Pelayanan Perbaikan Aset
		Ringan	Sedang	Berat	
1	Warung Nasi	0	0	0	0
2	Warung Nasi Kopi	0	0	0	0
3	Kios	0	0	0	0
4	Warung	0	0	0	0
5	Rumah	0	0	0	0

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengumpulan data bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap beberapa aspek sasaran, meliputi: daftar warga negara yang berada di kawasan rawan bencana, daftar kerawanan tempat tinggal individu warga negara, rekapitulasi kelompok warga negara berdasarkan kelompok kerawanan desa, rekapitulasi aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana, daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan, rekapitulasi warga negara wajib latih, daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana, daftar ketersediaan stok logistik pengungsian, daftar warga negara yang menjadi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana), daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana), daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana), daftar kejadian bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana).

Hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara

Jenis Kerawanan Tempat Tinggal														Nomor Variasi Kelompok Kerawanan	Peran Dalam Penanggulangan Bencana		
No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah	Letusan Gunung Api	Gelombang Laut Ekstrim	Angin Topan	Kekeringan	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Epidemi Dan Wabah		Warga Negara Rawan Bencana	Aparatur Yang Menangani Sub Urusan Bencana	Petugas Operasi Tanggap Darurat
1	Palu Timur	Besusu Barat		√	√	√											
		Besusu Tengah		√	√												
		Besusu Timur		√	√												
		Lolu Selatan		√		√											
		Lolu Utara		√													
2	Palu Barat	Ujuna		√	√	√											
		Balaroa		√		√	√				√						
		Kamonji		√													
		Baru		√	√	√											
		Lere		√	√	√				√							
		Siranindi		√													
3	Palu Selatan	Tatura Utara		√		√											
		Birobuli Utara		√		√											
		Petobo		√		√	√					√					
		Birobuli Selatan		√		√											
		Tatura Selatan		√		√											
4	Palu Utara	Mamboro		√	√	√				√	√	√		√			
		Taipa		√	√	√				√	√			√			
		Kayumalue Ngapa		√	√	√				√	√						
		Kayumalue Pajeko		√	√	√					√	√		√			
		Mamboro Barat		√	√	√				√	√			√			
5	Ulujadi	Buluri		√	√	√				√	√						
		Donggala Kodi		√			√				√			√			
		Kabonena		√		√	√				√			√			
		Silae		√	√	√				√	√						
		Watusampu		√	√	√				√	√						
		Tipo		√	√	√				√	√						
6	Tatanga	Nunu		√		√											
		Palupi		√								√					

Jenis Kerawanan Tempat Tinggal														Nomor Variasi Kelompok Kerawanan	Peran Dalam Penanggulangan Bencana		
No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah	Letusan Gunung Api	Gelombang Laut Ekstrim	Angin Topan	Kekeringan	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Epidemi Dan Wabah		Warga Negara Rawan Bencana	Aparatur Yang Menangani Sub Urusan Bencana	Petugas Operasi Tanggap Darurat
7	Tawaeli	Tavanjuka		√						√	√						
		Pengawu		√						√	√						
		Duyu		√						√	√						
		Boyaoge		√		√											
		Pantoloan		√	√	√			√	√							
		Pantoloan Boya		√	√	√			√	√							
		Baiya		√	√	√			√	√							
8	Mantikulore	Lambara		√	√	√			√	√							
		Panawu		√	√	√			√	√							
		Layana Indah		√	√	√			√	√	√		√				
		Tondo		√	√	√	√		√	√			√				
		Talise		√	√	√			√	√			√				
		Tanamodindi		√									√				
		Lasoani		√								√	√				
		Poboya		√			√					√					
		Kawatuna		√		√	√					√	√				
		Talise Valangguni		√								√	√				

Sumber data : Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pengumpulan data bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu terhadap beberapa aspek sasaran, meliputi: pendataan spm damkar kabupaten/kota, daftar relawan kabupaten/kota, daftar warga negara yang menjadi korban kebakaran kabupaten/kota.

Hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Format Data Dukung Pelaksanaan SPM

No.	Provinsi Kabupaten/ Kota	Bentuk Kelembagaan				Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Besaran APBD	Alokasi APBD Untuk Sub Urusan Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran						PNS	Jumlah Petugas				Jumlah Kejadian Kebakaran			
		Damkar	Satpol PP	BPBD	Tipe					Mobil Damkar	Mobil Tangki	Mobil Tangga	Mobil Rescue	Mobil Lainnya	Tandon Air/ Ground Tank		Jabatan/ Kualifikasi	Non Pns	Jabatan/ Kualifikasi	Relawan Kebakaran	2	2	2	2
																					0	0	0	0
																					2	2	2	2
1	2	3	4																					
	Palu	√			B	374.779	395,06	1,835,736,983,599	662.792.700	6	4	-	1	5	186	Kepala Dinas/ S2	134	Tenaga Operasional Lapangan	66	1	1	3	2	
																Sekretaris/S2				6	8	7	5	
																Kepala Bidang Sartek/ S2				0	2	3	3	
																Kepala Bidang Pencegahan Dan Penindakan/S2								
																Kepala Bidng Penanggulangan Dan Peyelamatan/S1								
																Analisis Pemadam Kebakaran/S2								
																Analisis Pemadam Kebakaran/S1								
																Kasie.Penyuluhan Pencegahan Kebakaran/S1								
																Analisis Pemadam Kebakaran/S1								
																Kasubag.Perencanaan Program Dn Keuangan/S1								
																Kasie.Pemeliharaan Sarana Teknis/S1								
																Kasie. Inspeksi Dan Penindakan/S1								
																Kasie. Penyelamatan Dan Penanganan B3/S2								
																Kasubag.Kepegawaian Dan Umum/S2								
																Kasie.Pengadaan Dan Penyediaan Sarana Teknis /S2								

No.	Provinsi Kabupaten/ Kota	Bentuk Kelembagaan				Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Besaran APBD	Alokasi APBD Untuk Sub Urusan Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran						Jumlah Petugas					Jumlah Kejadian Kebakaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Damkar	Satpol PP	BPBD	Tipe					Mobil Damkar	Mobil Tangki	Mobil Tangga	Mobil Rescue	Mobil Lainnya	Tandon Air/ Ground Tank	PNS	Jabatan/ Kualifikasi	Non Pns	Jabatan/ Kualifikasi	Relawan Kebakaran	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Tabel 2.22
Rekapitulasi Relawan Pemadam Kebakaran

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterampilan	Alamat
1.	Akmal Saputra	laki-laki	23	Simulasi	Jl. Agatis Palu
2.	Zulfikri Gunawan	laki-laki	25	Simulasi	Jl. R.E Martadinata
3.	Moh. Fajar Sadiq Syafaat	laki-laki	22	Simulasi	Desa Kalangkangan
4.	Arman	laki-laki	26	Simulasi	Jl. Sisingamangaraja Lr. Virgo
5.	Nurul Intan	perempuan	23	Simulasi	Jl. Yos Sudarso
6.	Eka Pratiwi Fitrianiingsih	perempuan	24	Simulasi	Jl. CUMI-CUMI
7.	Ramadhani Fitriani	perempuan	24	Simulasi	Jl. Tanggul Utara
8.	Rahmanto	laki-laki	40	Simulasi	Jl.BOYANEMPA
9.	Andi Marwan Razik	laki-laki	41	Simulasi	Jl. BERINGIN 02 NO.10
10.	Ivon Nila Krisna	perempuan	46	Simulasi	Jl.Jati No.32
11.	Moh. Arjal	laki-laki	32	Simulasi	Jl. Uwe Salura
12.	Apriani	perempuan	31	Simulasi	Jl. UNTAD II PALU
13.	Abdi. S. Husni	laki-laki	23		Jl. Tombolotutu No. 110
14.	Dirsan	laki-laki	35	Simulasi	Jl. RE MARTADINATA
15.	Moh Nuhillahi	laki-laki	23		Jl. R.E MARTADINATA
16.	Ahmad Setialvin	laki-laki	23	Simulasi	Jl. R.E Martadinata
17.	Taufan	laki-laki	41	Simulasi	Jl. W.R. SUPRATMAN NO. 2A
18.	Siti Rahmadani	perempuan	22	Simulasi	Jl. CUMI-CUMI
19.	Sul Maulana	laki-laki	23	Simulasi	Jl. Sisingamangaraja Lrg. Virga No. 9 Palu
20.	Alan	laki-laki	24		Jl. Soekarno Hatta
21.	Syahrir Amrin	laki-laki	26		Jl. R.E. MARTADINATA
22.	Iksan	laki-laki	28		Jl. Uwe Lambori
23.	Syaiful	laki-laki	34		Jl. Bukit Zaitun
24.	Amar Edin	laki-laki	29	Simulasi	Jl. Dupa Indah
25.	Ham Moligay	laki-laki	49		Btn Korpri Blk B2 No. 65
26.	Inggryani	perempuan	24		Jl. Bunga Raya
27.	Iskandar Zulkarnain	laki-laki	30	Simulasi	Jl. BUNGA RAYA
28.	Andrianto A. Husein	laki-laki	29		Jl. SUKARNO HATTA
29.	Moh. Ardiansyah	laki-laki	24		Jl. DJAELANGKARA
30.	Indi Priyanto	laki-laki	26	Simulasi	Jl. BUNGA RAYA
31.	Taufan	laki-laki	33	Simulasi	Jl. CENDRAWASIH NO. 37 A
32.	Melda Handayani	perempuan	31		Jl. R.E MARTADINATA PALU
33.	Ujang Zainudin N. Djusuna	laki-laki	29		Jl. TELAGA RAYA PALU

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterampilan	Alamat
34.	Tajuddin	laki-laki	43		Jl. Banteng
35.	Fajrin Karago	laki-laki	22		Jl. LAGARUTU
36.	Tande Lemba	laki-laki	44		Jl. Towua No. 15b
37.	Septian Andri Irawan	laki-laki	27		Jl. Dayodara Btn Bulu Bulava Indah
38.	Andika Rayhan Syafi'i	laki-laki	22		Jl. TALAGA RAYA
39.	Amrul Sodikin	laki-laki	32		Layana Indah Blk J 15
40.	Wardiman	laki-laki	31	Simulasi	Jl. Dupa Indah 2
41.	Mohamad Awal	laki-laki	26		Jl. JEND. H. MOH SOEHARTO
42.	Rizaldi	laki-laki	28	Simulasi	Jl. YOS SUDARSO NO 95 B PALU
43.	Andri	laki-laki	37	Simulasi	Jl. Bunga Raya
44.	Wahrul	laki-laki	26		Jl. DIPA INDAH
45.	Ahmad Afandi	laki-laki	23		Jl. DJAELANGKARA
46.	Heriyanto	laki-laki	40		Jl. Kijang Palu
47.	Putra Sandi Agan	laki-laki	23		Jl. Veteran No. 101
48.	Nurhidayat	laki-laki	25		Jl. DIPA II
49.	Iin Anggraini	perempuan	26	Simulasi	Jl. Bosa
50.	Moh. Haris	laki-laki	26		Jl. Lambara
51.	Ariyeni	perempuan	24		Jl. BUNGA RAYA
52.	Fiska	perempuan	43		Jl. JATI NO. 93 PALU
53.	Adesetiaman	laki-laki	23		Jl. Tombolotutu No. 98 A
54.	Zulfikar	laki-laki	35	Simulasi	Jl. BUNGA RAYA
55.	Suandi	laki-laki	51		Jl. TOWUA LRG. SATELIT 2
56.	Didit Afriyanto	laki-laki	35		Jl. DAYO DARA
57.	Nunung Safitri	perempuan	22		Bulili
58.	Andi Ikhwan	laki-laki	23		Jl. Djaelangkara
59.	Ardiansyah	laki-laki	22		Jl. Kebun Sari
60.	Riski Aditya Pangiu	laki-laki	27		Jl. Tombolotutu No. 6 Palu
61.	Fadlan	laki-laki	23		Jl. Lagarutu
62.	Korta Desmayanto	laki-laki	34		Btn Korpri Blok B2 No. 59
63.	Samsir	laki-laki	30	Simulasi	Jl. Pue Lomba
64.	Mohammad Ridwan	laki-laki	30		Jl. Djaelangkara
65.	Fikri	laki-laki	22		Jl. Veteran No. 50
66.	Tasdin	laki-laki	28	Simulasi	Jl. Dupa li

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Tabel 2.23
Rekapitulasi Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia					Kondisi Fisik		NIK	No. KK	Tempat Lahir	Tgl. Lahir	Alamat
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1.	Dr. Ir.titik Wardianosih	0	p	0	0	0	√	0	√	0	0	0	0	0	Jl. Ks. Tubun Kel Talise Induk
2	H. Yunus Pakka	L	0						√	0					Jl. Vatu Mangumpu
3	Hasrinuddin	L	0						√	0					Jl. Jati Kel. Nunu
4	Usman	L	0						√	0					Jl. Tg. Manimbaya Kel. Tatura
5	Rusli	L	0						√	0					Jl. Emy Saelan Kel. Tatura Utara
6	Jubaedah	0	P						√	0					Jl. Selar Kel. Lere Kel. Palbar
7	PEMDA Maluku Utara	0	0						√	0					Jl. Selar Kel. Lere Kel. Palbar
8	Nurdin. R Masalandra	L	0						√	0					Jl. Padang Jakaya Kel. Pengawu
9	Ahmad	L	0						√	0					Jl. Kenduri Kel. Balaroa
10	Mujiro	L	0						√	0					Jl. Kenduri Kel. Balaroa
11	Amal	L	0						√	0					Jl. Dr. Suharso
12	Dian Krismasari	0	P						√	0					Jl. Jati Lrg. Siranindi Kel. Tavanjuka
13	abdul Salam	L	0						√	0					Jl. Untad I Lrg. Juanda Kel. Tondo
14	Yudirman	L	0						√	0					Jl. Baligau Kel. Tavanjuka
15	Mansyur	L	0						√	0					Jl. Labu Kel. Balaroa
16	Nurjanah	0	P						√	0					Jl. Wr. Supratman Kel. Kamomji
17	Farha Ahmhdali	L	0						√	0					Jl. Baharino.38 Kel. Pantoloan
18	Saripa	0	P						√	0					Jl. Sigma Irg. Sintuvu Kel. Tanamodindi
19	Junaidi	L	0						√	0					Jl. Talua Khonel Kel. Mambo
20	Andika	L	0						√	0					Jl. Bukit Dadavi Kel. Talise Valangguni
21	Syarifa Alaydrus	0	P						√	0					Jl. Wahid Hasim Kel. Baru
22	James	L	0						√	0					Jl. RE Martadinata Kel. Layana
23	H. Idrus Alkaf	L	0						√	0					Jl. Wr. Supratman Kel. Kamomji
24	Moh. Afdal	L	0						√	0					Jl. Jalur Gaza Kel. Kabonena
25	Aris	L	0						√	0					Jl. Kebun Sari Kel. Petobo
26	Kelvin	L	0						√	0					Jl. Tg. Dako Irg. Kosgoro Kel. Lolu
27	Fitriani Hi. Lataria	L	0						√	0					Jl. Seta Budi Kel. Besusu Timur
28	Suriadi	L	0						√	0					Jl. Untad I Kel. Tondo
29	Tohip	L	0						√	0					Jl. Tg Dako Kel.Tatura Utara
30	Iwan	L	0						√	0					Jl. Suprptono. 15 Kel. Talise
31	Agung Perdana Putra	L	0						√	0					Jl. Suprptono. 15 Kel. Talise
32	Rusmi Widayati	0	P						√	0					Jl. Slamet Riadi Kel. Besusu Timur
33	Samir	0	P						√	0					Jl. Garuda no. 23 Kel. Lasoani
34	Suyono	0	P						√	0					BTN Palu Nagaya Kel. Donggala Kodi

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah

2.1.6. Bidang Urusan Sosial

Pengumpulan data bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu terhadap beberapa aspek sasaran, meliputi: data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat, rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/komunitas), rekapitulasi estimasi jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, data dan rekapitulasi jumlah sumberdaya manusia kesejahteraan sosial (SDM kesos), data dan rekapitulasi sarana dan prasarana untuk pemenuhan pelayanan dasar pada spm bidang sosial daerah kabupaten/kota.

Hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga (Berbasis Keluarga/Masyarakat/Komunitas)

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Penyandang Disabilitas Terlantar (Fisik)	Penyandang Disabilitas Terlantar (Intelektual)	Penyandang Disabilitas Terlantar (Mental)	Penyandang Disabilitas Terlantar (Sensorik)	Penyandang Disabilitas Terlantar (Ganda)	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	Ket
	Kota Palu	Palu Selatan		16		4				1	3	
		Ulujadi		5								
		Tatanga		9		1				1	2	
		Mantikolore		19		4			1	1	4	
		Palu Utara		8								
		Tawaeli		9								
		Palu Barat		15		10				9	14	
		Palu Timur		9		5				1		
	Kab Sigi					1				4	10	
	Makassar								1			
	Kab.Parigi								4			
	Maoutong											
	Donnggala									2		
	Total			90		25			6	19	32	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Sosial Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.25
Data Dan Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Spm Bidang Sosial Daerah Kota Palu

No	Jumlah Penerima Pelayanan Dasar Yang Membuthkan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana											Kondisi Sarana Prasarana			Tingkat Kerusakan		
		Shelter/ Rumah Singgah	Puskesmas	Call Center	Kendaraan Khusus Kedaruratan	TRC Ketelantaran	Dapur Umum	LDP	Manajemen Logistik	Manajemen Shelter	Keposkoan	KSB	TRC Bencana	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Rendah	Sedang
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																		
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																	
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																	
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																	
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																	
	Total sarana prasarana yang ada	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1		Baik			Sedang
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan				2													
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																		
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota				75								30					
	Total sarpras yang ada				4										Baik			Sedang
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan				1													

Sumber data : Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

2.2. Perhitungan Kebutuhan dan Pemenuhan Pelayanan dasar

2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan

Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan ideal dengan ketersediaan layanan pendidikan yang ada, sehingga dapat disusun rencana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun perhitungan kebutuhan dan pemenuhan pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Perhitungan Pemenuhan Pelayanan Dasar

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse Diaan	Selisih (+/-)	Harga Satuan (Rp)	Kebutuhan Biaya (Rp)
1	Program SPM Pendidikan	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhanlayanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1 Tersedianya data	Peserta didik	5	0	5	64.050.000	320.250.000
				2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2 Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan	5	0	5	19.713.000	98.565.000
				3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3 Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik	200	0	200	500.000	100.000.000
				4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4 Peserta didik terlayani	Peserta didik	46	15	31	1.800.000.000	55.800.000.000
				5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5 Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	-	-
				6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6 Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	-	-
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan		1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1 Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan	5	0	5	150.000.000	750.000.000
				2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan	2 Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar / lokakarya	Kegiatan	5	0	5	296.820.000	1.484.100.000

		paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan							
		3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3 Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan	5	0	5	53.445.000	267.225.000
		4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4 Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan	100	0	100	38.000.000	3.800.000.000
		5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5 Terselenggaranya pemeliharaan dan	Kegiatan	63	58	5	437.400.000	2.187.000.000
Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan	5	0	5	367.394.800	1.836.974.000
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	5	0	5	367.394.800	1.836.974.000
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Ajuan formasi guru	Guru			0	-	-
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4 Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	0	0	0	-	-
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5 Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	3	0	3	-	-
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6 Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan	3	3	0	-	-
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik	7 Tersedianya data	Pengawas atau penilik	0	0	0	-	-

					untuk satuan pendidikan anak usia dini									
				Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	0	0	0	-	-
					2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	-	-
					3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan	0	0	0	-	-
2	Program Pendidikan Dasar	SPM	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/ SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik	2500	0	2500	500.000	1.250.000.000
					2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	2500	0	2500	1.000.000	2.500.000.000
					3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	-	-
					4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	-	-
				Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas	0	0	0	-	-
					2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan	5	0	5	105.090.000	525.450.000

Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan	5	0	5	653.527.000	3.267.635.000
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan	5	0	5	38.000.000	190.000.000
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	2038	1963	75	437.400.000	32.805.000.000
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan	5	0	5	653.527.000	3.267.635.000
Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan	5	0	5	367.394.800	1.836.974.000
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	5	0	5	367.394.800	1.836.974.000
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru	0	0	0		
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	0	0	0		

		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	40	13	27
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan	7	7	0
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas	35	35	0
	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	0	0	0
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan	0	0	0

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.2.2. Bidang Urusan Kesehatan

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang, jasa, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Terdapat 2 (dua) form penghitungan kebutuhan, yaitu:

- Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin dan Perlengkapan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan. Form ini menjelaskan bahwa semua mutu minimal pelayanan dasar baik itu dari peralatan dan obat-obatan telah dapat dipenuhi. Selain itu untuk pengadaan alat kesehatan dilakukan sesuai kebutuhan dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan, maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.
- Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar. Kebutuhan SDM untuk setiap jenis pelayanan dasar telah dapat terpenuhi dan dirinci sesuai kebutuhan pelayanan tersebut, mulai dari dokter, perawat, nutrisionis, tenaga kesehatan masyarakat hingga kader kesehatan

Tabel 2.27
Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kota Palu

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Barang	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	6.107,2	2.764	3.343,2	-	
		Tablet Tambah Darah	Tablet	1.374.120	2.836.290	-1.462.170	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: test kehamilan	Paket	7.634	6.879	755	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Hb	Paket	7.634	3.967	3.667	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Gol Darah	Paket	7.634	2.697	4.937	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein urine	Paket	1.145,1	1.496	-350,9	-	
		<i>(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)</i>						
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Hepatitis B, Sifilis, dan HIV	Paket	7.634	8.236	-602	-	
		Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	50	50	0	-	
		Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
		Gel USG <i>(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)</i>	Botol	508	430	78	-	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf	Formulir	2.037	3.265	-1.228		
		Kartu Ibu/Rekam medis Ibu	Paket	50	50	0	-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		<i>(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)</i>						
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	7.267	4.441	2.826	-	
		Vitamin K1 injeksi	Ampul	7.267	1.453	5.814	-	
		Salep/tetes mata antibiotik	Pcs	7.267	1.612	5.655	-	
		Formulir bayi baru lahir	Formulir	7.267	3.337	3.930	-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Barang	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	30	30	0	-	
		Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)	Formulir	19.563	6.923	12.640	-	
		Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Vitamin A biru	Kapsul	5.267	8.682	-3.415	-	
		Vitamin A merah	Kapsul	30.780	18.477	12.303	-	
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.650	2.515	135	-	
		Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3.379	3.493	-114	-	
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2.908	2.167	741	-	
		Vaksin imunisasi dasar: DPT-Hb-Hib	Vaksin	3.473	2.161	1.312	-	
		Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	2.715	2.519	196	-	
		Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	2.357	1.710	647	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-Hb-Hib	Vaksin	2.489	1.175	1.314	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan: Campak	Vaksin	2.351	1.238	1.113	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan: Rubella	Vaksin	2.355	1.328	1.027	-	
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	76.611	61.680	0	-	
		Peralatan Anafilaktik	Paket	4.556	61.680	-57.124	-	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	32.827	6.688	26.139	-	
		Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	32.827	6.273	26.554	-	
		Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	32.170	3.906	28.264	-	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	21.250	23.000	-1.750	-	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	21.208	5.000	16.208	-	
		Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	596.552	568.063	-271.511	-	
		Alat Pemeriksaan Hb	Alat	3.671	1.548	2.123	-	
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	8.597	3.979	4.618	-	
		Media promosi kesehatan	Paket	28	28	0	-	
		Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan BIAS	Vaksin	3.945	2.778	1.167	-	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Barang	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	42	42	0	-	
		Alat : Tensimeter	Unit	42	42	0	-	
		Alat : Glukometer	Unit	31	31	0	-	
		Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	64	32	32	-	
		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	426.743	110.629,1	316.114	-	
		Alat : Kit IVA tes	Unit	51	9	42	-	
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	33.957	2.543	31.414	-	
		Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27	16	11	-	
		Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	Dokumen	23.168	301	22.867	-	
		Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	-	
		Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	1.253	868	385	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak menular (SIPTM)	Dokumen	14	14	0	-	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0	-	
		Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	31	31	0	-	
		Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	47	47	0	-	
		Bahan medis Habis Pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	15.992	7.925	8.067	-	
		Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL)	Paket	761	761	0	-	
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	699	699	0	-	
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Obat Hipertensi	Paket	611.316	652.400	-41.084	-	
		Tensimeter	Unit	42	42	0	-	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Barang	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	15	15	0	-	
		Media promosi kesehatan	Paket	14	14	0	-	
		Obat Diabetes Melitus	Paket	307.100	134.300	172.800	-	
		Fotometer atau Glukometer	Uni	7.455	1.319	6.136	-	
		Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	49.761,5	37.231,7	12.529,8	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	Formulir	1.719	1.719	0	-	
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	42	42	0	-	
		Sarana dan Prasarana	Unit	14	14	0	-	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	14	14	0	-	
		Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	1	1	0	-	
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	1.603	1.603	0	-	
		Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	14	14	0	-	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	14	14	0	-	
		Reagen Zn TB	Kit	72	81	-9	-	
		Masker bedah dan Masker N95	Buah	7.470	13.500	-6.030	-	
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.435	6.097	-662	-	
		Katrid tes cepat molekuler	Test	3.850	3.850	0	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporann	Dokumen	14	14	0	-	
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	-	
		Tuberkulin	Vial	130	131	-1	-	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Barang	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunidefi ciency virus)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	2.000	4.207	-2.207	-	
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6.790	3.486	3.304	-	
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	3.998	2.992	1.006	-	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.28
Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Kota Palu

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jenis SDM Kesehatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; <i>(angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"</i>	Orang	20	33	-13	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	9	46	-37	
		Tenaga kesehatan: Bidan <i>(angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)</i>	Orang	85	141	-56	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang				
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi <i>(angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)</i>	Orang	19	32	-13	
		Tenaga kesehatan: Bidan <i>(angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)</i>	Orang	76	136	-60	
		Tenaga kesehatan: Perawat <i>(angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)</i>	Orang	8	44	-36	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang				
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	17	31	-14	
		Tenaga kesehatan: Bidan <i>(angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)</i>	Orang	80	136	-56	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	12	46	-34	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang				
		Kader Kesehatan	Orang				

Jenis		Jenis SDM Kesehatan		Jumlah	Jumlah	Selisih	Ket.
No.	Pelayanan Dasar		Satuan	Kebutuhan	Tersedia		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Tenaga medis: Dokter	Orang	21	31	-10	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	55	120	-65	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	34	68	-34	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	21	25	-4	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku	Orang	59	95	-36	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang				
		Kader Kesehatan	Orang				
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	22	32	-10	
		Tenaga medis: Dokter	Orang	23	92	-69	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	29	66	-36	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	16	19	-3	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	33	-17	
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	33	16	17	
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tenaga non kesehatan terlatih: Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer counselor	Orang	13	145	-132	
		Tenaga medis: Dokter	Orang	23	35	-12	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	62	127	-65	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	57	88	-31	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	16	18	-2	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	35	-15	
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	45	149	-104	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Tenaga medis: Dokter	Orang	20	34	-14	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	54	123	-69	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	43	82	-39	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	12	17	-5	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	33	-17	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jenis SDM Kesehatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Ket.
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	110	261	-151	
		Tenaga medis: Dokter	Orang	20	33	-13	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	26	95	-69	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	50	83	-33	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	18	34	-16	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tenaga medis: Dokter	Orang	20	33	-13	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	26	95	-69	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	50	83	-33	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	18	34	-16	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	13	17	-4	
		Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	12	2	10	
		Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	13	13	0	
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	12	5	7	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ paru	Orang	0	0	0	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	12	50		
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	0	0	0	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	32	-18	
		Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	15	-1	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jenis SDM Kesehatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Ket.
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunidefi ciency virus)	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	6	1	5	
		Kader Kesehatan	Orang	34	15	19	
		Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	16	23	-7	
		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	32	100	-68	
		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	32	64	-32	
		Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	13	11	2	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	17	34	-17	
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	26	7	19	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.29
Rumah Terlayani SPAM

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Nama Kepala Keluarga	NIK	Jumlah Anggota Rumah	Kondisi Ekonomi Keluarga		Sudah Terlayani		Belum Terlayani	Jarak Sumber Air Ke Penampungan Pengotor/Limbah	
								MBR	Non MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	Ulujadi	Buluri	01	02	Muhammad	7271020104920004	5	1	0	1	0		1	0
					Aksan	7271020504820004	4	1	0	1	0		1	0
					Ayub Diangsah	7271051802950001	3	1	0	1	0		1	0
					Agung Setiawan	7271051112890001	6	1	0	1	0		1	0
					Abd. Rauf Pratama	7271021505000004	4	1	0	1	0		1	0
					Saeha Yalitonji	7271025601530001	2	1	0	1	0		1	0
					Rudia Lantungka	7271024107490017	1	1	0	1	0		1	0
					Hasan	7271021411640002	4	1	0	1	0		1	0
					Ardin	7271021608750002	4	1	0	1	0		1	0
					Dahlan Hasyim	7271022808680005	6	1	0	1	0		1	0
					Ariyanto	7271022703920004	7	1	0	1	0		1	0
					Turimin	7271020807800002	4	1	0	1	0		1	0
					Sudirman	7271021011830005	6	1	0	1	0		1	0
					Sapia Dadu	7271056609710001	1	1	0	1	0		1	0
					Selviyani Mince	7271025309860002	4	1	0	1	0		1	0
					Rusdin	7271022506650003	4	1	0	1	0		1	0
					Rinal	7271024303810008	3	1	0	1	0		1	0
					Nikho Demus Hered	7271023011520001	4	1	0	1	0		1	0
					Muhammad	7271031003820008	3	1	0	1	0		1	0
					Kamaria	7271026511630003	2	1	0	1	0		1	0
					Kalima	7271024107530065	1	1	0	1	0		1	0
					Hadewi	7271024104570048	2	1	0	1	0		1	0
					Darsan Banse	7271020107570037	3	1	0	1	0		1	0
					Doing Shalihin	7271022712840001	5	1	0	1	0		1	0
					Dg. Lando	7271020208740005	4	1	0	1	0		1	0
					Jumriah	7271026706780005	3	1	0	1	0		1	0

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Nama Kepala Keluarga	NIK	Jumlah Anggota Rumah	Kondisi Ekonomi Keluarga		Sudah Terlayani		Belum Terlayani	Jarak Sumber Air Ke Penampungan Pengotor/Limbah	
								MBR	Non MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
*			01	03	Sri Rahayu Rahmadani	7271025912000004	2	1	0	1	0		1	0
					Vemy	7271025107790004	4	1	0	1	0		1	0
					Djamadi	7271020606540003	1	1	0	1	0		1	0
					Samsudin	7271020306680002	3	1	0	1	0		1	0
					Adri	7271022605650001	6	1	0	1	0		1	0
					Iksan	7271021607830003	4	1	0	1	0		1	0
					Zainuddin	7317041903880002	4	1	0	1	0		1	0
			02	01	Iwan	7210080606840001	5	1	0	1	0		1	0
					Muchlis	7271022205870004	3	1	0	1	0		1	0
					Moh. Rais	7271022607960002	4	1	0	1	0		1	0
					Muh. Dani	7271021204950003	4	1	0	1	0		1	0
					Rudi Ardiansya	7271051505780001	3	1	0	1	0		1	0
					Rizaldi	7210121108030004	2	1	0	1	0		1	0
					Abdillah	7271021108730007	2	1	0	1	0		1	0
					Dekrin	7271020412840003	3	1	0	1	0		1	0
					Maoludin	7271022401710001	3	1	0	1	0		1	0
					Ruslan	7271022508740002	4	1	0	1	0		1	0
					Rahudin Kr	7271021009570002	3	1	0	1	0		1	0
					Yowan A. Hasan	7271021102820003	4	1	0	1	0		1	0
					Arwin	7271052505750002	7	1	0	1	0		1	0
					Awang	7271021002790003	5	1	0	1	0		1	0
					Yukas	7271022403690004	3	1	0	1	0		1	0
					Ajmain	7271021104820002	4	1	0	1	0		1	0
					Suharlan	7271021904770001	4	1	0	1	0		1	0
					Edwar	7271020107760010	4	1	0	1	0		1	0
					Muliadi	7271022605020003	3	1	0	1	0		1	0
					Afriansyah	7271020704990005	3	1	0	1	0		1	0
					Wisnu	7208041208950002	6	1	0	1	0		1	0
					Rendi	7210141408020001	3	1	0	1	0		1	0
					Rona	727026803850005	3	1	0	1	0		1	0
					Rahman	7271022710760002	5	1	0	1	0		1	0
					Irsan	7271020610750003	3	1	0	1	0		1	0
					Acong	7271020507580008	2	1	0	1	0		1	0

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Nama Kepala Keluarga	NIK	Jumlah Anggota Rumah	Kondisi Ekonomi Keluarga		Sudah Terlayani		Belum Terlayani	Jarak Sumber Air Ke Penampungan Pengotor/Limbah	
								MBR	Non MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
*					Apria	7271024404640006	2	1	0	1	0		1	0
					Selman	7210140112870001	2	1	0	1	0		1	0
					Irwan	7271021711750003	4	1	0	1	0		1	0
					Azwar	7271020305980003	4	1	0	1	0		1	0
					Dedy	7271020408830001	5	1	0	1	0		1	0
		02		02	Ander Fardiansah	7271021803970001	3	1	0	1	0		1	0
					Aspani	7271024202670004	4	1	0	1	0		1	0
					Tofan	7271020403890003	5	1	0	1	0		1	0
					Risman	7271052302890001	1	1	0	1	0		1	0
					Deser	7271020101900030	4	1	0	1	0		1	0
					Nasrulah	7210090107830058	3	1	0	1	0		1	0
					Efendi	7206032101810002	5	1	0	1	0		1	0
					Muksin	7271021304700001	6	1	0	1	0		1	0
					Farisman	7271020903810004	6	1	0	1	0		1	0
					Dony Darmawan	7271032212930009	7	1	0	1	0		1	0
					Inoria	7271024711640002	1	1	0	1	0		1	0
					Risman Bebanua	7504010107890010	5	1	0	1	0		1	0
					Hamrizal	7271022910900001	4	1	0	1	0		1	0
					Aristan	7271020703780003	2	1	0	1	0		1	0
					Diki	7271052501000001	3	1	0	1	0		1	0
					Arisman	7271020101770012	7	1	0	1	0		1	0
					Nirvan Pole	7202074506930001	2	1	0	1	0		1	0
					Eci	7271021003820001	4	1	0	1	0		1	0
					Arif	7271022506870004	4	1	0	1	0		1	0
					Akriani	7271026407930003	2	1	0	1	0		1	0
					Sirlan	7271022307760001	4	1	0	1	0		1	0
					Ifan Dermawan	7271052004010001	2	1	0	1	0		1	0
					Ucok	7271021512960002	3	1	0	1	0		1	0
					Igelman	7271020109020001	3	1	0	1	0		1	0
					Nadia	7271026707700001	3	1	0	1	0		1	0
					Darsono	7271053012690001	2	1	0	1	0		1	0
					Wawan	7271020107780025	3	1	0	1	0		1	0
					Haya	7271020411650001	1	1	0	1	0		1	0

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Nama Kepala Keluarga	NIK	Jumlah Anggota Rumah	Kondisi Ekonomi Keluarga		Sudah Terlayani		Belum Terlayani	Jarak Sumber Air Ke Penampungan Pengotor/Limbah	
								MBR	Non MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1					Erwin	7271020101790016	5	1	0	1	0		1	0
					Harsin	7271020510780010	2	1	0	1	0		1	0
					Angga	7271020701870002	5	1	0	1	0		1	0
					Ihwan	7271021610770002	1	1	0	1	0		1	0
					Curlan	7271020310770003	1	1	0	1	0		1	0
					Ancu	7271020107920002	3	1	0	1	0		1	0
					Riswandi	7208030104870001	5	1	0	1	0		1	0
					Nasrulah	7210090107830058	3	1	0	1	0		1	0
		Baiya	05	10	Jasman	7271042011620000	5	1	0	0	1		1	0
					Asbar	7271040205780002	4	1	0	0	1		1	0
					Moh Agus	7271041308910001	4	1	0	0	1		1	0
		06	11		Anton	7271070204900001	5	1	0	0	1		1	0
					Abdul Rahman	7271042502950001	4	1	0	0	1		1	0
					Ahmad	7271040805660001	5	1	0	0	1		1	0
					Andi Ramli	7271040207960002	3	1	0	0	1		1	0
					Ahmad Lasimpo	7271040510760002	4	1	0	0	1		1	0
					Rasna	7271046802560001	2	1	0	0	1		1	0
					Wahyudi Abuba	7271046602860001	3	1	0	0	1		1	0
					Total			110	-	100	10	-	110	-

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

2.2.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.30
Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum	Dampak Kegiatan	Perhitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Trantibum	Keterangan
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP	Tersusunnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang dijalani sehingga meminimalisir kesalahan dan dampak terkait pelaksanaan kegiatan	2,5 % dari Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	Dengan terpenuhinya kebutuhan kapasitas SDM akan mewujudkan pelaksana kegiatan yang Profesional dan mengerti tugas, pokok, dan fungsinya dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan		
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	Dengan adanya Sarana dan Prasarana yang memadai akan mempermudah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam memaksimalkan kinerjanya		
4		Pelayanan Perbaikan Materil	Dengan adanya Pelayanan yang diberikan dari dampak ganti rugi akibat penegkan perda akan berdampak tertanganinya persoalan akibat kerugian yang dialami akibat penegakan Perda/Perkada		
5		Pelayanan Pengobatan	Layanan Pengobatan yang diberikan akan memberikan layanan yang maksimal dari akibat Penegakan Perda yang terjadi, sehingga menimbulkan tanggung jawab serta dampak pentingnya adalah mengurangi dampak kerugian dan dampak benturan yang mengakibatkan cedera untuk anggota maupun masyarakat		
6		Kebutuhan lainnya			

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.31
Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP

NO.	Jenis SOP	Kebutuhan Sop		Harga Satuan Kegiatan Penyusunan	Besaran Biaya
		Sop Baru	Pembaharuan SOP		
1	Penegakan Peraturan Daerah/ Perkada		√	15.000	30.000
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pembinaan dan Penyuluhan)		√	15.000	30.000
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		√	15.000	30.000
4	Pengawalan pejabat/orang-orang penting		√	15.000	30.000
5	Operasional patroli		√	15.000	30.000
6	Pengamanan tempat-tempat penting		√	15.000	30.000
7	Deteksi Dini dan Cegah Dini		√	15.000	30.000

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.32
Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Kebutuhan PNS Dan Non PNS Satpol PP				Jumlah Kebutuhan PPPNS				Jumlah Satlinmas		
		Diklat Dasar	Diklat Teknis Lain	Harga Satuan Per Jenis Diklat	Besaran Biaya	Eksisting	Kebutuhan	Harga Satuan	Besaran Biaya	Bimtek	Harga Satuan	Besaran Biaya
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	173	-	5.000.000	865.000.000	2	4	50.000.000	200.000.000	108	50.000	5.400.000

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.33
Penghitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana SATPOL PP

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana			Harga Satuan	Besaran Biaya
		Eksisting	Kebutuhan	Kekurangan		
1	Minibus	1	2	1	300.000.000	300.000.000
2	Truk	2	4	2	400.000.000	800.000.000
3	Pick Up	7	10	3	200.000.000	600.000.000
4	Sepeda Motor	32	50	18	30.000.000	540.000.000

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 2.34
Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/ Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan	23	(A*C)+(B*C)	68.000.000
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran	11		
			C. Harga unit per jenis	2.000.000		
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar	A. Jumlah rig di pusdalops	5	(A*D)+(B*D)+(C*D)	77.385.000
			B. Jumlah perangkat komputer	1		
			C. Jumlah sound sistem/sirine TOA	8		
			D. Harga unit per jenis	2.795.000		
				7.410.000		
				7.000.000		
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. Jumlah server	-	(A*C)+(B*C)	25.000.000
			B. Jumlah Perangkat Komputer	5		
			C. Harga unit per jenis	5.000.000		

Sumber data : Laporan SPM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.35
Layanan Pelaksanaan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan		
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1.	Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A.Jumlah sektor/pos	2	A*B*C	3.040.000.000	
				B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	2			
				C. Harga satu unit	760.000.000			
		2.	Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	11	A*B*C	423.500.000	
					B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			11
					C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			3.500.000
		3.	Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	11	(A*B)*C	187.000.000	
					B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			2.500
					C. Harga per liter bahan bakar			6.800
		4.	Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	144	(A*B)*C	833.038.272	
	B. Jumlah pelatihan			2				
	C. Biaya per pelatihan			2.892.494				
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	2	A*B	799.628.460	
					A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			399.814.230
		2.	Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	1	A*B	2.600.000	
					A. Harga perJumlah/jenis/set/paket/unit			2.600.000
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1.	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	8	A*B	-	
					B. Harga per jumlah/volume			-

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan
4		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	5	(A*B)*C	35.000.000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	5		
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	1.400.000		
	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	144	A*B	345.600.000
			B. honorarium piket jaga	2.400.000		
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	144	A*B	63.981.792
			A. honorarium per kejadian kebakaran	444.318		

Sumber data : Laporan SPM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.36
Layanan Pelaksanaan Penyelamatan Dan Evakuasi

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/ Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	3	A*B*C	1.200.000.000
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1		
			C. Harga satu unit	400.000.000		
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1	(A*B)*C	23.119.998
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	6		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	3.853.333		
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1	(A*B)*C	1.788.000
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	120		
			C. Harga per liter bahan bakar	14.900		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)	5	A*B	741.850.000
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	148.370.000		
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	16	A*B	38.400.000
			B. Honorarium piket jaga	2.400.000		
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	5	A*B	2.221.590
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	444.318		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyalamatan	A. Jumlah petugas	16	(A*B)*C	138.839.712
			B. Jumlah pelatihan	3		
			C. Biaya per pelatihan	2.892.494		

Sumber data : Laporan SPM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.37
Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/ Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	4	A*B	47.834.200
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	11.958.550		
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan	4	A*B	47.834.200
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan	11.958.550		
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar/Redkar	142	A*B	14.964.528
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	105.384		
		2. Penyediaan Sarana satlakar	A. Jumlah satlakar/ Redkar	142	(A*B)*C	21.300.000
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar/Redkar	1		
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket	150.000		
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar/ Redkar	142	A*B	14.964.528
			B. Biaya per kegiatan satlakar/Redkar	105.384		

Sumber data : Laporan SPM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.38
Layanan Pendataan, Inspeksi Dan Investigasi Pasca Kebakaran

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/ Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	4	$((A*B*C*D)+(E*F))$	317.550.512
			B. Jenis potensi risiko	4		
			C. Jumlah orang	8		
			D. Jumlah bulan kerja	4		
			E. Jumlah pertemuan	30		
			F. ATK dan penggandaan laporan	10.585.000		
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	4	$((A*B*C)+(D*E))$	317.550.128
			B. Jumlah orang	8		
			C. Jumlah bulan kerja	4		
			D. Jumlah pertemuan	30		
			E. ATK dan penggandaan laporan	10585000		
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A. Jenis tenaga ahli	3	$((A*B*C)+(D*E))$	45.000.054
			B. Jumlah orang	6		
			C. Jumlah bulan kerja	3		
			D. Jumlah pertemuan	15		
			E. ATK dan penggandaan laporan	3000000		
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>	26.000.000	$((A+B+C)+((D+E)*F+ ((D+G)*H)+I)$	351.716.001
			B. Penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus, layar, computer set</i>)	8.000.000		
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi	32.000.000		
			D. Akomodasi dan konsumsi	504.000		
			E. Transport peserta	50.000		
			F. Jumlah peserta	50		
			G. Honor tenaga ahli	64.000.000		
			H. Jumlah tenaga ahli laporan	4		
			I. Laporan	1		
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran	87	$(A*B*C)+D$	158.937.500

No.	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Jumlah/ Biaya Satuan	Rumus	Total Jumlah Biaya Yang Dibutuhkan
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	B. Jumlah petugas pendataan	5	(A*B)*C	128.999.360
			C. Honorarium petugas pendataan	365000		
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	162500		
			A. Jumlah bangunan gedung	304		
			B. Jumlah petugas	5		
			C. Biaya per kegiatan	84868		
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	304	(A*B)*C	128.999.360
			B. Jumlah petugas	5		
			C. Biaya per kegiatan	84868		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas	2	(A*B)*C	54.670.000
			B. Jumlah pelatihan	1		
			C. Biaya per pelatihan	27335000		
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas	5	(A*B)*C	1.697.360
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung	4		
			C. Biaya kegiatan	84868		
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas	5	A*B*C*D	147.670.320
			B. Frekuensi investigasi	87		
			C. Jumlah sarana pendukung	4		
			D. Biaya per kegiatan investigasi	84868		

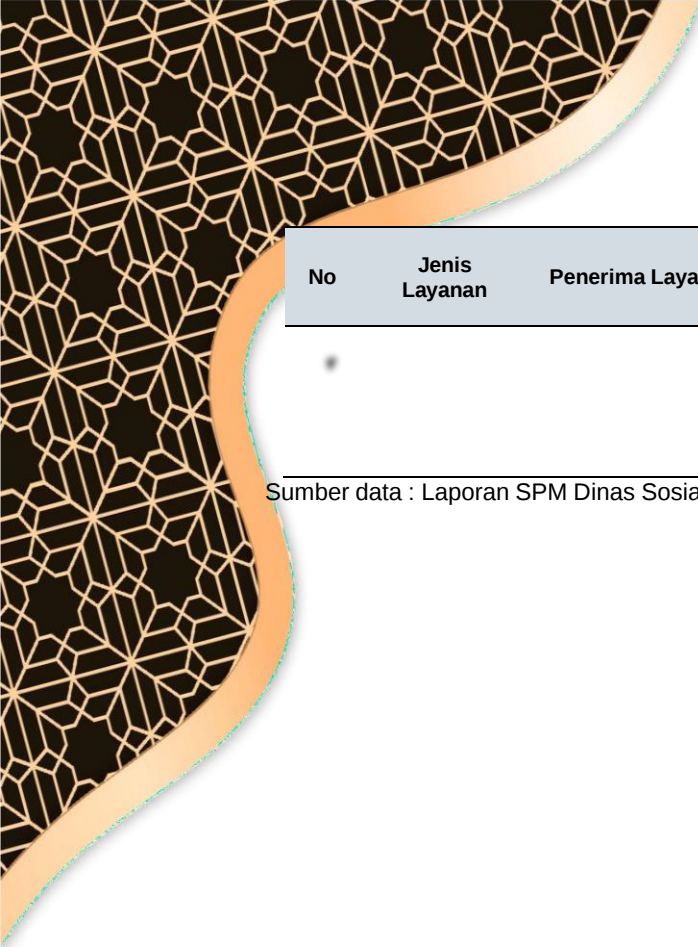
Sumber data : Laporan SPM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.2.5. Bidang Urusan Sosial

Tabel 2.39
Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Standar Layanan	Indikator Spm/ Sub Kegiatan	Target/Pemenuhan SPM	Komponen Biaya	Perhitungan	Data Yang Dibutuhkan
1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/ kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/ kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/ kota		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kabupaten/kota. Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti.
			A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanan		a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji b) Biaya perjalanan/ transport petugas c) Biaya pengiriman d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f Nasi bungkus untuk korban bencana = 3524 =Rp.79.290.000	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Standar Layanan	Indikator Spm/ Sub Kegiatan	Target/Pemenuhan SPM	Komponen Biaya	Perhitungan	Data Yang Dibutuhkan
			B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids b) Biaya perjalanan/transport petugas c) Biaya pengiriman d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$ barang diserahkan kepada masyarakat (paket bantuan sandang stok gudang Bencana alam dan Sosial) Rp.154.050.210	
			1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$	
			2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$ 20 paket	
				e. Pelayanan dukungan psikosial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikosial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial;	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$ Honor Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Rp. 12.000.000	



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Standar Layanan	Indikator Spm/ Sub Kegiatan	Target/Pemenuhan SPM	Komponen Biaya	Perhitungan	Data Yang Dibutuhkan
						(c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.		

Sumber data : Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

2.3.1. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 2.40
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1	Tersedianya Data	Peserta didik		1	64,05	64,05	1	64,05	64,05	1	64,05	64,05	1	64,05	64,05	1	64,05	64,05	
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan		1	19,71	19,71	1	19,71	19,71	1	19,71	19,71	1	19,71	19,71	1	19,71	19,71	

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	HargaSatuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	HargaSatuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya pendidikan	bantuan	Peserta didik		200	0,50	0,50	200	0,50	100	200	0,50	100	200	0,50	100			
				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4	Peserta terlayani	didik	Peserta didik		1	1800	1800	1	1800	1800	1	1800	1800	1	1800	1800			
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta terlayani	didik	Peserta didik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6	Peserta terlayani	didik	Peserta didik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)
			Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan		1	150	150	1	150	150	1	150	150	1	150	150	1	150	150	
				2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2	Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan		1	296.82	296.82	1	296.82	296.82	1	296.82	296.82	1	296.82	296.82	1	296.82	296.82	
				3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan		1	53,45	53,45	1	53,45	53,45	1	53,45	53,45	1	53,45	53,45	1	53,45	53,45	

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan		20	38	760	20	38	760	20	38	760	20	38	760				
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan		1	437,4	437,4	1	437,4	437,4	1	437,4	437,4	1	437,4	437,4				
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependikan		1	367.39	367.39	1	367.39	367.39	1	367.39	367.39	1	367.39	367.39				
		kependidikan		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi	Pendidik dan tenaga kependikan		1	367.39	367.39	1	367.39	367.39	1	367.39	367.39	1	367.39	367.39				

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024
										2020		2021		2022		2023		2024				
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024	
										2020		2021		2022		2023		2024					
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)				
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru	3	Kepala sekolah atau mengikuti pelatihan	Kegiatan guru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024
										2020		2021		2022		2023		2024				
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)			
	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak																	
				1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik	500	0,5	250	500	0,5	250	500	0,5	250	500	0,5	250		
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan pendidikan	biaya Peserta didik	500	1	500	500	1	500	500	1	500	500	1	500		
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta terlayani	didik Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta terlayani	didik Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas		1	105,0	105,09	1	105,0	105,09	1	105,0	105,09	1	105,0	105,09				
				2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan		1	105,0	105,09	1	105,0	105,09	1	105,0	105,09	1	105,0	105,09				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan		1	105,0	105,09	1	105,0	105,09	1	105,0	105,09	1	105,0	105,09				

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Rp (Juta)
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan		20	38	760	20	38	760	20	38	760	20	38	760				
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan		1	437,4	437,4	1	437,4	437,4	1	437,4	437,4	1	437,4	437,4				
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan		1	105.09	105.09	1	105.09	105.09	1	105.09	105.09	1	105.09	105.09				

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024
										2020		2021		2022		2023		2024				
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)			
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2 Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Ajuan formasi guru	Guru				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4 Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024
										2020		2021		2022		2023		2024				
										Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)	Target	Harga Satuan Rp (Juta)			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekzolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawa s		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidika n		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)		Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa bantuan pendidikan	atau biaya tenaga kependidikan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala atau mengikuti pelatihan	sekolah guru Kegiatan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.3.2. Bidang Urusan Kesehatan

Penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran dilakukan sesuai dengan tahapan rencana kerja yang tertuang dalam Renstra dan Renja PD sesuai strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan dasar wwarga negara sasaran SPM. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perangkat daerah menetapkan target pencaiaipan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan yang dimuat dalam dokumen renja PD dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:

1. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara.
2. Tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan warga Negara.
3. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar penerima layanan.

Dalam urusan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Palu melaksanakan perencanaan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Form 2.C.3 dan Form 2.C.4, sebagai berikut:

Tabel 2.41
Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2024

Kode *)	Urusan/Bidang Urusan/Program *)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Rpjmd (Tahun N)	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar																
1	02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan																
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	66.404.755.308	100	64.209.416.919	100	60.592.444.524	100	68.359.760.923	100	69.793.050.944	100	329.359.428.618	DINAS KESEHATAN

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.42
Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kota Palu Tahun 2024

N O.	KOD E *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/P ROGRAM /KEGIATAN /S UB KEGIAT AN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COM E)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	66.404.755.308	100	64.209.416.919	100	60.592.444.524	100	68.359.760.923	100	69.793.050.944	100	329.359.428.618	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	14 Puskesmas	46.846.065.483	14 Puskesmas	46.552.758.711	14 Puskesmas	44.008.111.175	14 Puskesmas	46.728.603.383	14 Puskesmas	48.051.479.242	14 Puskesmas	232.187.017.994		
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.770 bumil	7.770 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	2.438.307.000	
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.416 bulin	7.416 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	2.563.125.000	
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.837 bayi	6.837 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	1.254.800.000	

N O.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/P ROGRAM /KEGIATAN/S UB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR P ERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.158 balita	45.158 balita	30.509.750	49.674 balita	32.035.238	49.674 balita	33.636.999	49.674 balita	35.318.849	49.674 balita	37.084.792	49.674 balita	168.585.628	
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.744 murid	41.744 murid	46.022.500	45.918 murid	48.323.625	45.918 murid	50.739.806	45.918 murid	53.276.797	45.918 murid	55.940.636	45.918 murid	254.303.364	
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250.384 jiwa	250.384 jiwa	3.400.000	275.422 jiwa	3.570.000	275.422 jiwa	3.748.500	275.422 jiwa	3.935.925	275.422 jiwa	4.132.721	275.422 jiwa	18.787.146	
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.468 jiwa	27.468 jiwa	457.885.000	29.115 jiwa	480.779.250	29.115 jiwa	504.818.213	29.115 jiwa	530.059.123	29.115 jiwa	556.562.079	29.115 jiwa	2.530.103.665	
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.239 jiwa	28.239 jiwa	2.210.000	31.063 jiwa	2.320.500	31.063 jiwa	2.436.525	31.063 jiwa	2.558.351	31.063 jiwa	2.686.269	31.063 jiwa	12.211.645	
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.137 jiwa	9.137 jiwa	2.200.000	10.051 jiwa	2.310.000	10.051 jiwa	2.425.500	10.051 jiwa	2.546.775	10.051 jiwa	2.674.114	10.051 jiwa	12.156.389	
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	723 kasus	723 kasus	2.700.000	795 kasus	2.835.000	795 kasus	2.976.750	795 kasus	3.125.588	795 kasus	3.281.867	795 kasus	14.919.204	

N O.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/P ROGRAM /KEGIATAN/S UB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINE		
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3			TAHUN- N+4	T
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7						
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14.895 jiwa	14.895 jiwa	26.060.000	16.385			
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Jumlah O							

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.3.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.43
Rencana Pemenuhan Air Minum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Rencana Tahun Anggaran N+1		Opd Pelaksana
						Lokasi	Alokasi Dana (Rp)	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	96,51	%		9.221.880.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	96,51	%		9.221.880.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Dok		184.995.000	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	10	L/Det		7.012.355.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10	Unit		2.024.530.000	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.44
Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik

No *	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Rencana Tahun Anggaran N+1		Opd Pelaksana
						Lokasi	Alokasi Dana (Rp)	
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	8,16	%	Kec. Mantikulore		Dinas Pekerjaan Umum
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	8,16	%	Kota Palu		
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100	Rumah Tangga	Kota Palu	145.565.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperasikan dan Dipelihara	1	Lokasi	Kec. Mantikulore	317.785.100	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.3.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.45
Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Kerangka Pendanaan

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	1.312.500.000	APBD	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	84.600.000	APBD	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	600.000.000	APBD	Tercapainya Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.46
Rencana Pemenuhan Personil SATPOL PP

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.312.500.000	APBD	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	84.600.000	APBD	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	600.000.000	APBD	Tercapainya Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.47
Rencana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Disediakan	Unit	400.000.000	APBD	Belum Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (Pengangkut Hewan Ternak)

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 2.48
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Pos Damkar Eksisting	Jumlah Relawan Damkar Eksisting	Rencana Jumlah Penambahan Pos Damkar	Rencana Pembentukan Relawan
1	Palu	8	3	66	5	8

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

2.4.1. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 2.49
Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	1	-	1		100,00%				
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan	1	-	1		100,00%				
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik	1193	715.800.000	1193	715.800.000	100,00%	100,00%	BOSP		
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik	14559	-	10166		69,83%				
5	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan	1	-	1		100,00%				
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan	1	-	1		100,00%				
10	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
11	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan	1	1.622.923.668	1	1.397.396.750	100,00%	86,10%			
12	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	1	-	1	-	100,00%				
13	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	1	-	1	-	100,00%				
14	Jumlahajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengawas atau penilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik		51.965.889.621		50.424.405.109	#DIV/0!	97,03%			

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
24	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Unit komunitas	8	-	8		100,00%				
27	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1	-	1		100,00%				
28	Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1	-	1		100,00%				
29	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan		2.363.192.421		2.346.324.400		99,29%			
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1	-	1		100,00%				
32	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	1	-	1		100,00%				
33	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	1	-	1		100,00%				
34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru	308	-	308		100,00%				
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	19	-	19		100,00%				
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	7	-	7		100,00%				
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik	1	-	1		100,00%				
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.4.2. Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 2.50
Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Tahun N)			Pendanaan (Tahun N)				Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.634	7.451	97,60	191.710.000	83.560.000	43,59	APBD, DAK		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.634	7.592	99,45	356.882.950	337.012.950	94,43	APBD		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.267	7.593	104,48	220.386.340	147.954.800	67,13	APBD, DAK		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	37.032	34.828	94,05	6.215.500	4.215.500	67,82	APBD		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	61.091	60.131	98,43	1.525.100	1.275.100	83,61	APBD		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	255.030	226.088	88,65	353.141.400	2.141.400	0,61	APBD, DAK		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	30.370	29.855	98,30	770.525.000	751.550.000	97,54	APBD		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	69.351	66.859	96,41	2.000.000	2.000.000	100,00	APBD		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.222	6.563	105,48	552.134.700	552.134.700	100,00	APBD, DAK		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Tahun N)			Pendanaan (Tahun N)			Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	815	621	76,20	45.270.000	12.670.000	27,99	APBD, DAK	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	9.142	9.185	100,47	1.167.081.150	1.164.295.808	99,76	APBD, DAK	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	10.919	13.775	126,16	185.500.000	145.500.000	78,44	APBD, DAK	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

2.4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.51
Capaian Layanan Air Minum

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi		
			Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
1	Palu Timur	Besusu Barat	3.869	250	3.559	60
2	Palu Timur	Besusu Tengah	2.178	250	1.851	77
3	Palu Timur	Besusu Timur	2.513	250	2.186	77
4	Palu Timur	Lolu Selatan	3.779	150	3.590	39
5	Palu Timur	Lolu Utara	3.102	100	2.947	55
6	Palu Barat	Ujuna	2.740	163	2.493	84
7	Palu Barat	Balaroa	3.792	100	3.602	90
8	Palu Barat	Kamonji	2.495	153	2.246	97
9	Palu Barat	Baru	1.729	134	1.556	39
10	Palu Barat	Lere	3.458	725	2.594	140
11	Palu Barat	Siranindi	1.734	141	1.561	32
12	Palu Slatan	Tatura Utara	5.985	100	5.805	80
13	Palu Slatan	Birobuli Utara	6.356	401	5.879	76
14	Palu Slatan	Petobo	4.132	555	3.471	106
15	Palu Slatan	Birobuli Selatan	4.055	100	3.933	22
16	Palu Slatan	Tatura Selatan	3.691	100	3.506	85
17	Palu Utara	Mamboro	2.522	931	1.513	78
18	Palu Utara	Taipa	1.943	198	1.554	191
19	Palu Utara	Kayumalue Ngapa	1.454	260	1.018	176
20	Palu Utara	Kayumalue Pajeko	1.073	161	751	161
21	Palu Utara	Mamboro Barat	1.130	10	1.017	103
22	Ulujadi	Buluri	1.267	20	1.140	107

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi		
			Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
23	Ulujadi	Donggala Kodi	3.292	172	2.963	157
24	Ulujadi	Kabonena	2.599	320	2.131	148
25	Ulujadi	Silae	2.229	291	1.850	88
26	Ulujadi	Watusampu	941	0	847	94
27	Ulujadi	Tipo	1.441	112	1.153	176
28	Tatanga	Nunu	3.107	200	2.796	111
29	Tatanga	Palupi	3.171	1.742	1.332	97
30	Tatanga	Tavanjuka	1.771	117	1.594	60
31	Tatanga	Pengawu	2.813	598	2.110	105
32	Tatanga	Duyu	3.802	2.566	1.141	95
33	Tatanga	Boyaoge	2.865	100	2.693	72
34	Tawaeli	Pantoloan	1.834	132	1.651	51
35	Tawaeli	Pantoloan Boya	1.288	150	1.030	108
36	Tawaeli	Baiya	1.778	119	1.600	59
37	Tawaeli	Lambara	1.265	131	1.012	122
38	Tawaeli	Mpanau	1.386	200	1.109	77
39	Mantikulore	Layana Indah	1.516	200	1.213	103
40	Mantikulore	Tondo	6.069	2.571	3.338	160
41	Mantikulore	Talise	4.990	1.539	3.343	108
42	Mantikulore	Tanamondidi	4.597	1.466	3.034	97
43	Mantikulore	Lasoani	4.052	3.039	932	81
44	Mantikulore	Poboya	1.500	1.222	180	98
45	Mantikulore	Kawatuna	1.903	1.589	228	86
46	Mantikulore	Talise Valangguni	2.506	508	1.930	68
Total *)			127.712	24.336	98.984	4.392

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.52
Capaian Layanan Air Limbah Domestik

No.	Kecamatan	Keluarahan	Target					Realisasi			
			Total	Akses Dasar/ Akses Layak Perdesaan	Akses Aman Spald-S	Akses Aman Spald-T	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman Spald-S	Akses Aman Spald-T
1	Palu Barat	Ujuna	31	31				31			
		Balaroa	16	16				16			
		Baru	20	20				20			
		Lere	26	26				26			
2	Mantikulore	Kawatuna	39	20	19			20		19	
		Layana Indah	49	39	10			39		10	
		Lasoani	29		29					29	
		Poboya	1		1					1	
		Talise	57		57					57	
		Tanamodindi	48		48					48	
		Tondo	41		41					41	
		Talise Valangguni	21		21					21	
3	Palu Selatan	Birobuli Utara	53	29	24			29		24	
		Birobuli Selatan	49		49					49	
		Petobo	3		3					3	
		Tatura Utara	22		22					22	
		Tatura Selatan	21		21					21	
4	Tawaeli	Lambara	35	35				35			
		Pantoloan Boya	26	26				26			
5	Ulujadi	Kabonena	33	33				33			
Total			620	275	345			275		345	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

2.4.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.53
Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara

No.	Keluaran (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian				Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%						
1	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Pengobatan akibat dari penegakan perda dan perkada	Orang	100	Rp. 9.000.000	-	-	-	-	APBD		Dampak akibat penegakan Perda/ Perkada dengan mengatur dan merencanakan strategi layanan yang akan dilakukan serta memberikan layanan penyuluhan dan edukasi serta menjalankan pola kedekatan emosional terhadap elemen masyarakat sebagai bentuk antisipasi dan mengurangi dampak benturan dilapangan
2	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Ganti rugi akibat dari penegakan perda dan perkada	Orang	100	Rp. 9.000.000		-	-		APBD		

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.54
Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Dan Prasarana

No.	Keluaran (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Dana	Permasalahan	SOLUSI			
1	Jumlah Motor yang diadakan	Unit	50	1.500.000.000	32	960.000.000	64	64	APBD	Belum cukupnya anggaran pengadaan Motor	Penambahan Anggaran untuk Pengadaan
2	Jumlah Truck yang di adakan	Unit	4	1.600.000.000	2	800.000.000	50	50	APBD	Belum cukupnya anggaran pengadaan Truck	Penambahan Anggaran untuk Pengadaan
3	Jumlah Patroli Bus Microbus	Unit	2	600.000.000	1	300.000.000	50	50	APBD	Belum cukupnya anggaran pengadaan Patroli Bus Microbus	Penambahan Anggaran untuk Pengadaan
4	Pick Up	Unit	7	1.400.000.000	5	1.000.000.000	71,4	71,4	APBD	Belum cukupnya anggaran pengadaan Pick Up	Penambahan Anggaran untuk Pengadaan

Sumber data : Laporan SPM Satuan Polisi pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 2.55
Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Pemadaman Dan Evakuasi)

No.	Kabupaten/Kota	Capaian SPM Oleh Petugas Damkar (%)	Capaian SPM Oleh Relawan Damkar (%)	Total Capaian SPM (%)
1	Kota Palu	100	7,95	53,98

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 2.56
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran) Kota Palu

No.	Kabupaten/ Kota	Operasi Non Kebakaran							
		Kecelakaan Transportasi	Water Rescue	Animal Rescue	Penyelamatan Pada Ketinggian	Penyelamatan Pada Bangunan Runtuh	Penanganan Pohon Tumbang	Penanganan Percobaan Bunuh Diri	Lainnya
	Kota Palu	12	8	145	0	0	55	0	0

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

2.4.5. Bidang Urusan Sosial

Tabel 2.57
Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti Kabupaten Kota

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp.	Volume	Rp.	Fisik	Keuangan			
1	Penyediaan Permakanan	Orang	173	20.400.500	173	12.240.400			DAU		
2	Penyediaan Alat Bantu	Orang	53	99.473.750	53	81.716.000			DAU		
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	173	585.529.000	173	506.754.500			DAU/DAU ENMARK		
4	Penyediaan Makanan	Orang	75	413.013.900	1614	412.926.900			DAU		
5	Penyediaan Sandang	Orang	75	354.050.210	1614	354.004.878			DAU		
6	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	-	-	-	-					
7	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	75	12.350.000	1614	12.350.000			DAU		

Sumber data : Laporan SPM Dinas Sosial Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

BAB 3

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/ petunjuk dalam melaksanakan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi. Diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Palu karena berkenaan dan menyangkut dengan pelayanan hak dasar setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Palu terus berupaya mencapai dan mengimplementasikan indikator pelayanan minimal pendidikan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak setiap warga masyarakat di Kota Palu.

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Penerapan standar pelayanan minimal urusan pendidikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh

setiap Peserta Didik secara minimal. Untuk daerah kabupaten/kota jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota adalah :

Tabel 3.1
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan Tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah 100% dengan rincian target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	14.559	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	61.091	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	562	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

3. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 sebesar 437,994,882,246,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 427.137.419.168,3,- dan belanja modal sebesar Rp. 10.857.463.077,-. Untuk alokasi anggaran perangkat daerah dan anggaran untuk penerapan SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

No	Pendanaan	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1,835,736,983,599	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	445.710.340.245	24,28
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	220,375,704,048	12,00
	APBD	220,375,704,048	
	A. APBD Murni	0	
	B. APBD DAU	39,378,598,162	2,15
	C. APBD DAK Fisik	7,646,280,000	0,42
	D. APBD DAK NON Fisik	173,350,825,886	9,44

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa persentase anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dibandingkan dengan APBD Kota Palu mencapai 23,86%, sementara anggaran yang diperuntukkan bagi penerapan SPM sebesar 12%.

4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan Pendidikan adalah sebanyak 4.206 orang bai pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan maupun pada Satuan Pendidikan, yang terdiri dari :

Tabel 3.4
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	PNS					
	- Golongan I	0	1	0	0	1
	- Golongan II	0	37	23	0	60
	- Golongan III	0	25	723	43	791
	- Golongan IV	0	12	567	101	680
2	PPPK	0	0	851	20	871
3	Non ASN	361	58	1337	47	1803
	Jumlah	361	133	3501	211	4206

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, 2024 (data diolah)

5. Hasil Capaian

Pencapaian SPM pelayanan dasar urusan Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan
Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
			Target	Realisasi	%	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	14.559	10.166	69,83	65,81
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	61.091	61.851	100	91,54
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	562	520	92,53	94,82

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Berkaitan dengan pencapaian penerapan SPM urusan pendidikan, perhitungan pencapaian didasarkan pada 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Realisasi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Penerima Layanan Dasar		Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian Jenis Pelayanan Dasar
			Realisasi	80%	Realisasi	20%	
1	2	3	4	5=4*80%	6	7=6*20%	8=5+7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	69,83	55,86	65,81	13,16	69,02
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	80,00	77,85	15,57	98,31
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	80	79,80	15,96	92,98

Capaian SPM Urusan Pendidikan
86,77%

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa capaian SPM bidang urusan pendidikan belum tercapai secara maksimal yaitu dengan capaian **86,77%** dengan kriteria **TUNTAS MADYA**. Hasil ini menunjukkan kinerja penerapan SPM urusan pendidikan turun dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 87,86%.

Selanjutnya, capaian pada sisi anggaran Dinas Pendidikan dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	445.710.340.245	444.796.437.071	99,79
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	220,375,704,048	213.613.320.746	96,93

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Rincian realisasi anggaran penerapan SPM bidang pendidikan yang tertuang dalam program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM
Bidang Urusan Pendidikan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Pagu 2024	Realisasi	%
Program : Pengelolaan Pendidikan	105,672,045,562	100,256,896,638	94.88
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	51,890,265,656	50,090,209,247	96.53
Subkegiatan :			
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3,351,485,473	3,173,910,200	94.70
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	959,341,050	945,245,700	98.53
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,306,582,329	5,190,858,020	97.82
Pengadaan Mebel Sekolah	2,150,044,300	2,125,574,300	98.86
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300,000,000	300,000,000	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	31,489,163,470	31,204,714,149	99.10
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	420,554,250	398,007,628	94.64
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3,752,361,050	2,657,228,050	70.81
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,686,186,188	1,671,759,350	99.14
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	111,355,125	76,587,450	68.78
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,363,192,421	2,346,324,400	99.29
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38,641,023,879	36,244,940,629	93.80
Subkegiatan :			
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	230,501,750	228,853,500	99.28

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Pagu 2024	Realisasi	%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	859,300,000	854,688,000	99.46
Pembangunan Laboratorium	1,733,550,000	1,724,763,600	99.49
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,440,725,735	1,439,650,320	99.93
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,209,245,850	3,173,660,780	98.89
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	519,75	519,75	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	249,149,638	248,715,100	99.83
Pengadaan Mebel Sekolah	432,111,248	426,057,650	98.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20,476,726,151	19,219,690,960	93.86
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,365,540,000	1,365,310,000	99.98
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	548,947,400	504,468,199	91.90
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6,118,967,150	5,092,033,520	83.22
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,975,739,207	1,966,529,250	99.53
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9,888,333,221	8,925,567,814	90.26
Subkegiatan :			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,622,923,668	1,397,396,750	86.10
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	953,417,103	702,979,700	73.73
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	62,639,650	50,948,757	81.34
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,161,465,800	979,334,278	84.32
Pengelolaan Dana BOP PAUD	6,087,887,000	5,794,908,329	95.19
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,252,422,806	4,996,178,948	95.12
Subkegiatan :			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,508,065,556	1,422,505,100	94.33
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,643,506,400	3,487,150,000	95.71
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100,850,850	86,523,848	85.79
Program : pendidik dan tenaga kependidikan	88,032,600	86,464,608	98.22
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	88,032,600	86,464,608	98.22
Subkegiatan :			
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88,032,600	86,464,608	98.22
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	114.615.625.886	113.269.959.500	98,83
Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah	114.615.625.886	113.269.959.500	98,83
Subkegiatan :			
Tunjangan profesi guru daerah	112,060,910,520	110,715,244,134	98.80
Tambahan penghasilan guru daerah	2,554,715,366	2,554,715,366	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi.

Penerapan SPM Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

Permasalahan:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan dan analisis data.
2. Rendahnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data.
3. Proses pengumpulan data yang kompleks dan memakan waktu.
4. Keterbatasan kompetensi petugas dalam bidang statistik, analisis data, dan perencanaan.
5. Data yang dibutuhkan untuk mengukur pencapaian SPM seringkali tidak lengkap.
6. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua indikator SPM.
7. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua indikator SPM

Solusi:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi petugas yang terlibat dalam pengumpulan data, analisis, dan perencanaan.
2. Koordinasi Intensif: Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan komitmen dan dukungan dalam pelaksanaan program.
3. Optimalisasi Penggunaan Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian SPM.
4. Pemanfaatan Teknologi : menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, dan pelaporan.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk

menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar pelayanan minimal urusan Kesehatan pada Tahun 2024 adalah 100% dari seluruh jenis pelayanan dasar dengan rincian target angka absolut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.634	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.634	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.267	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	37.032	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61.091	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	255.030	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	30.370	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	69.351	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.222	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	815	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9.142	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.919	100%

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

3. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Kesehatan Kota Palu dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 165.151.625.528,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 148.353.318.655,- dan belanja modal sebesar Rp. 16.798.306.873,-.

Tabel 3.11
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	165.151.625.528	9,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan :	9.029.545.573	0,49
	a. APBD DAU	6.393.318.183	
	b. APBD DAK Non Fisik	2.636.227.390	

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024

4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan kesehatan Tahun 2023 adalah sebanyak 721 orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	152
3	Golongan III	501
4	Golongan IV	68
	Jumlah	721

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024

Tabel 3.13
Konsisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	-
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	1
2	Fungsional	573
3	Pelaksana	141
	Jumlah	772

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024

5. Hasil capaian

Hasil capaian penerapan SPM urusan kesehatan pada Tahun 2024 baik capaian penerima layanan dasar dan capaian mutu layanan minimal layanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
		Target	Realisasi	%	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	7.634	7.451	97,60	88,52
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	7.634	7.592	99,45	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7.267	7.593	100	78,22
4	Pelayanan kesehatan balita	37.032	34.828	94,05	89,71
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	61.091	60.131	98,43	81,60
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	255.030	226.088	88,65	80,71
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30.370	29.855	98,30	96,12
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	69.351	66.859	96,41	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	6.222	6.563	100	93,21
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	815	621	76,20	88,89
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	9.142	9.185	100	97,99
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	10.919	13.775	100	92,62

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Perhitungan pencapaian SPM urusan kesehatan dihitung rata-rata total capaian yang melingkupi 80% pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar		Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	97,60	78,08	88,52	17,70	95,79
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,45	79,56	100	20	99,56

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar		Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	80	78,22	15,64	95,64
4	Pelayanan kesehatan balita	94,05	75,24	89,71	17,94	93,18
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	98,43	78,74	81,60	16,32	95,06
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	88,65	70,92	80,71	16,14	87,06
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	98,30	78,64	96,12	19,22	97,87
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	96,41	77,13	100	20	97,13
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	80	93,21	18,64	98,64
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	76,20	60,96	88,89	17,78	78,73
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	80	97,99	19,60	99,60
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100	80	92,62	18,52	98,52

Capaian SPM Urusan Kesehatan
94,64%

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa capaian SPM urusan kesehatan belum tercapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian **96,64%** dengan kriteria **TUNTAS UTAMA**. Hasil ini menunjukkan kinerja penerapan SPM bidang urusan kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 86,48%.

Selanjutnya dari sisi realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	165.151.625.528	156.827.881.739	94,96
2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan :	9.029.545.573	7.276.920.266	80,59

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (data diolah)

Rincian realisasi anggaran penerapan SPM Dinas Kesehatan yang tertuang dalam program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM
Bidang Urusan Kesehatan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.029.545.573	7.276.920.266	80,59
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.852.372.140	3.201.684.758	83,11
Subkegiatan:			
Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	191.710.000	83.560.000	43,59
Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	356.882.950	337.012.950	94,43
Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	220.386.340	147.954.800	67,13
Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	6.215.500	1.590.000	25,58
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.525.100	1.275.100	83,61
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	353.141.400	2.141.400	0,61
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	770.525.000	751.550.000	97,54
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	2.000.000	2.000.000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	552.134.700	552.134.700	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	45.270.000	12.670.000	27,99
Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.167.081.150	1.164.295.808	99,76
Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	185.500.000	145.500.000	78,44
Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.172.458.433	3.297.504.368	79,03
Subkegiatan:			
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.121.183.433	3.255.572.168	79,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	51.275.000	41.932.200	81,78
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.004.715.000	777.731.140	77,41
Subkegiatan:			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.095.000	776231140	77,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.620.000	500.000	13,81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000	1.000.000	100

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam pencapaian masing-masing jenis layanan dalam penerapan SPM Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan/kendala:

- Masih terkendala dengan jumlah sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu hamil yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan proyeksi.
- Masih terdapat ibu hamil yang terlambat memeriksakan kehamilan trimester I sesuai standar di fasilitas Kesehatan (Poskesdes, Puskesmas) yang secara tidak langsung mempengaruhi total cakupan K4 dan K6.
- Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan ibu hamil masih kurang tersedia.

Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- memaksimalkan program P4K, dan kelas ibu hamil di 14 Puskesmas Kota Palu.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan/kendala:

- Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu bersalin yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi.
- Pencatatan pelaporan pelayanan persalinan dari faskes di wilayah kerja Puskesmas masih ada yang terlewatkan sehingga mempengaruhi total cakupan persalinan.

Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun.

- Lebih mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan khususnya bidan dalam hal pelaporan pelayanan persalinan serta meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahan/kendala:

- Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah bayi baru lahir yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi.
- Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir masih kurang tersedia.

Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun.
- Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan/kendala:

- penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah balita yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi.
- Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua mutu dapat terpenuhi karena ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung masih kurang tersedia.
- Adanya perbedaan persepsi mengenai definisi operasional diantara kader Posyandu balita terkait standarisasi balita harus memenuhi kriteria pelayanan Kesehatan 8x baik secara frekuensi maupun kualitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan.
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya.

Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun.
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM.

- Melakukan sosialisasi SPM kepada masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Permasalahan/kendala:
 - Masih kurangnya bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung.
 - Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan anak sekolah.
 - Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
 - Kegiatan pembinaan dan penjangkaran Kesehatan anak sekolah yang belum terlaksana dengan baik, dimana harus menyesuaikan jadwal turun skrining petugas dengan aktivitas di sekolah karena sering terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan ada murid yang tidak sempat hadir di kelas yang akan mempengaruhi capaian sasaran target.
 - Jumlah sasaran anak sekolah yang akan diskruining tidak sesuai dengan jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang terbatas untuk kegiatan UKS.Solusi:
 - Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
 - Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
 - Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Permasalahan/kendala :
 - Masih belum awarenya masyarakat usia 15-59 memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik itu Puskemas maupun Posbindu PTM untuk pemeriksaan kesehatan karena takut mengetahui hasil pemeriksaan, dan mereka hanya melakukan skrining kesehatan hanya pada saat sakit saja.
 - Masih belum maksimalnya pelaksanaan skrining ke semua wilayah kerja Puskesmas karena tenaga PTM di Puskesmas dan Posbindu masih kurang.
 - Saat skrining masih ada warga masyarakat yang tidak membawa KTP sehingga terlepas dari pencatatan, karena sekarang pencatatan kunjungan terinput dalam aplikasi ASIK.

- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

Solusi:

- Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat penyuluhan, melaksanakan posbindu mobile, membuat inovasi Skrining PTM ditempat keramaian (pasar tradisional), serta memaksimalkan skrining PTM ke instansi pemerintah di wilayah kerja.
- Memaksimalkan kegiatan posbindu PTM dengan mendatangi suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, arisan-arisan dasawisma),
- Melakukan advokasi ulang ke lintas sektor terkait, lintas program, dan jejaring di wilayah kerja puskesmas.

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan/kendala:

- Jumlah lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan di Kota Palu masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan orang lansia.
- Dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor masih belum optimal.
- Pengetahuan lansia terkait pemanfaatan Posyandu Lansia di masyarakat yang masih rendah, dikarenakan kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang pola hidup sehat sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi lansia dalam memeriksakan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Posbindu lansia.

Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran lansia pada awal tahun.
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM.
- Tenaga kesehatan lebih intens dalam melakukan KIE serta pembinaan pada masyarakat lansia.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan/kendala:

- Masih banyak juga penderita hipertensi yang tidak rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas).
- Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan hipertensi.

- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- Pemahaman tentang definisi operasional antara penderita HT yang dilayani dengan HT terkendali yang masih kurang sehingga penegakan diagnose HT belum mencapai target

Solusi :

- Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM Hipertensi

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Permasalahan/kendala :

- Masih ada penderita DM yang tidak rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas)
- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Solusi :

- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Permasalahan/kendala:

- Penentuan perhitungan target penderita (0,21% dari jumlah penduduk) yang terlalu tinggi sehingga petugas mengalami kesulitan menjaring kasus di lapangan
- Masih kurangnya SDM terlatih kesehatan jiwa di Puskesmas, dimana petugas kesehatan / dokter ahli yang menangani kejiwaan hanya tersedia di rumah sakit sehingga untuk pelayanan rujukan atau kontrol ke faskes tingkat lanjut sering terkendala karena pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit
- Adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita ODGJ

- Masih kurangnya penganggaran terhadap penanganan masalah kejiwaan
- Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut belum terlaksana dengan baik sehingga untuk beberapa kasus yang dirujuk sering loss pencatatan

Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran penderita ODGJ pada awal tahun
- Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan terpadu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa
- Melakukan edukasi dan promosi kesehatan jiwa terhadap keluarga penderita ODGJ dan masyarakat
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanganan masalah ODGJ

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Permasalahan/kendala :

- Masih kurangnya ketersediaan Katridge TCM (tes cepat molekuler) di Puskesmas
- Penanganan kasus TB belum maksimal dikarenakan validitas pencatatan dan pelaporan masih membutuhkan kajian formulasi yang sesuai standar
- Masih perlunya menambah tenaga konselor TB di Puskesmas untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan, penanganan dan pendampingan pasien TB
- Masih perlunya menambah BMHP dan reagen Zn TB untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan pasien terduga TB
- Pemahaman dan persepsi masyarakat terkait penanganan pasien TB termasuk pemantauan keteraturan minum obat bagi penderita TB masih kurang

Solusi:

- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan TB sesuai standar
- Menambah jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

- Melakukan edukasi dan promosi penanganan pasien B sesuai prosedur terhadap keluarga penderita dan Masyarakat.

I. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Permasalahan:

- Perhitungan target/sasaran yang terlalu tinggi sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024 agak sulit untuk dipenuhi mengingat harus memenuhi standar mutu pelayanan 100%.
- Sistem pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal dikarenakan ketepatan waktu pelaporan dari Puskesmas dan jejaringnya sering terlewat, dan juga pemahaman atas definisi operasional dari masing-masing indikator masih kurang.
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan belum berjalan dengan baik.
- Sumber daya manusia kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas masih belum cukup untuk memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan.
- Masih kurangnya peran serta masyarakat khususnya kader kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran pelayanan kesehatan yang ingin dicapai
- Masih kurangnya pemenuhan BMHP untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar

Solusi:

- Melakukan pengkajian ulang mengenai penetapan perhitungan target/sasaran indikator SPM yang sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024
- Lebih mengoptimalkan pengumpulan data laporan yang tepat waktu dari fasilitas kesehatan primer dan meningkatkan pemahaman indikator bagi petugas kesehatan melalui kegiatan penguatan dan sosialisasi tentang juknis masing-masing indikator.
- Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan
- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standar
- Lebih meningkatkan peran aktif kader kesehatan yang melibatkan PKK serta lintas sektor melalui kegiatan refreshing kader
- Pengusulan pengadaan BHP melalui anggaran DAK maupun APBD.

C. **Urusan Pekerjaan Umum**

1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar pada urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

2. **Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	400	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.480	100%

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

3. **Anggaran**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu sebesar Rp. 250.984.949.586 atau sebesar 13,67 dari APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	250.984.949.586	13,67
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Pekerjaan Umum :	6.136.509.640	0,33
	a. APBD Murni	801.542.800	0,04
	b. APBD DAU	5.334.966.840	0,29

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024

4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum adalah sebanyak 80 orang yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Kondisi Pegawai ASN Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan II	11 Orang
2	Golongan III	64 Orang
3	Golongan IV	5 Orang
Jumlah		80 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 3.22
Kondisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural :	
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	4 Orang
	- Eselon IV	3 Orang
2	Fungsional	7 Orang
4	Pelaksana	65 Orang
Jumlah		80 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan pekerjaan umum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
		Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	440	400	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.480	2.480	100	100

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Perhitungan pencapaian didasarkan pada 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan pekerjaan umum Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar		Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian (%)
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	
1	2	4	5=4*80%	6	7=6*20%	8=5+7
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	80	100	20	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	80	100	20	100

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
100%

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada capaian penerima layanan dasar dan capaian mutu layanan minimal maka, capaian SPM urusan Pekerjaan Umum telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% atau dengan kriteria **TUNTAS UTAMA**.

Kemudian dari sisi realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	250.984.949.586	206.565.016.054	82,30
2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Pekerjaan Umum	6.136.509.640	5.430.877.579	88.50

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Sementara untuk realisasi anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait langsung dengan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.867.823.240	5.218.641.779	88,94
Kegiatan: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DI Daerah Kabupaten/Kota	5.867.823.240	5.218.641.779	88,94
SubKegiatan: 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.210.031.500	2.673.705.730	83,29
2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.490.676.240	2.489.955.549	99,97
Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	268.686.400	212.235.800	78,99
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	268.686.400	212.235.800	78,99
Subkegiatan: 1. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	67.924.300	51.267.300	75,48
2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.762.100	160.968.500	80,18
Jumlah	6.136.509.640	5.430.877.579	88,50

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berikut ini permasalahan dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang pekerjaan Umum:

a. Bidang Air minum

Permasalahan :

- Terdapat data dukung yang berbeda dari OPD pengampuh SPM
- PDAM Kota Belum terintegrasi dalam penanganan sistem perpipaan dan belum adanya Lembaga pengelola Air Minum /UPTD SPAM
- Masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan air baku terkait batas administratif wilayah Kota Palu

Solusi:

- Diperlukan satu OPD pengampuh untuk proses pendataan dalam Pemenuhan SPM
- Penggabungan PDAM Kota dan PDAM Donggala menjadi satu badan pengelola dalam penanganan Air Minum di Kota Palu
- Sosialisasi terhadap masyarakat dalam penggunaan Air yang tidak berlebihan, khususnya SPAM yang dikelola oleh masyarakat

b. Pengelolaan Limbah Domestik

Permasalahan:

- Kesadaran masih rendah terhadap pemahaman pentingnya sarana sanitasi yang aman dan layak sehingga sistem pengelolaan penyedotan lumpur tinja belum maksimal
- Antara Kegiatan Pembangunan Sanitasi layak dan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik terpisah dikarenakan ada dua Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengampuh untuk Pemenuhan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Solusi:

- Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bersih terkait sarana sanitasi yang aman dan layak juga terkait penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali baik secara langsung, iklan selebaran dan sosial media

- Program prioritas terhadap wilayah kawasan kumuh dalam pemenuhan sanitasi, khususnya sarana septic tank komunal atau individu
- Melakukan kolaborasi antar OPD dengan Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penerapan pemenuhan SPM

D. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024 (data diolah)

3. Anggaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu sebesar Rp. 75.801.629.868,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 34.981.474.666,- dan belanja modal sebesar Rp. 40.820.155.202,-.

Tabel 3.29
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	75.801.629.868	4,13
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	-

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

4. Dukungan Personil

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, sebanyak 37 orang.dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30
Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	1 Orang
2	Golongan II	5 Orang
3	Golongan III	23 Orang
4	Golongan IV	6 Orang
5	PPPK	2 Orang
Jumlah		37 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel 3.31
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural :	
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	3 Orang
	- Eselon IV	4 Orang
2	Fungsional	5 Orang
3	Pelaksana	24 Orang
Jumlah		37 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

5. Hasil Capaian

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPM bidang urusan perumahan rakyat maka diperoleh hasil pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.32
Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar (%)
		Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0	0	100	100

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)



Berdasarkan tabel 2.22 memperlihatkan bahwa tidak adanya realisasi dalam pencapaian penerima layanan dasar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bencana yang terjadi di Kota Palu sehingga tidak ditargetkan untuk rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Demikian pula halnya dengan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Dengan tidak adanya kedua jenis pelayanan tersebut baik target maupun realisasi maka dianggap pencapaiannya 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat ketentuan untuk melaksanakan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat Penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/ atau
3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten Kota

Sedangkan jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila ada surat penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam melaksanakan jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat maka pada realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Palu tahun 2024 belum dilaksanakan

Selanjutnya untuk perhitungan capaian SPM urusan perumahan rakyat dihitung melalui perhitungan pencapaian didasarkan pada 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan perumahan rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.33
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar		Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian (%)
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	
1	2	3	4=3*80%	5	6=5*20%	7=4+5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	80	100	20	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	80	100	20	100

Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
100%

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (data diolah)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM urusan pekerjaan umum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian **100%** atau dengan kriteria **TUNTAS PARIPURNA**.

Selanjutnya dari sisi realisasi anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	75.801.629.868	67.042.539.132	88,44
2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang dialokasikan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerapan SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Uraian	Pagu 2024	Realisasi (Rp)	%
Program: Pengembangan Perumahan	0	0	0
Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
Subkegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2024
(data diolah)

Pada Tahun Anggaran 2024, alolasi anggaran untuk penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tidak dianggarkan. Hal ini dikrenakan, pada Tahun 2024 tidak terjadinya bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah Masyarakat. Bencana yang dimaksud disini adalah kondisi darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan kepala daerah. Disamping itu, pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Palu juga tidak memiliki program yang mengakibatkan adanya warga yang harus di relokasi.

6. Permasalahan dan Solusi.

Pernasalahan:

- Belum tersedianya anggaran dalam pemenuhan data dalam hal pemenuhan layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Penyelenggaraan rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang menjadi layanan dasar SPM bidang perumahan Rakyat harus memenuhi ketentuan bahwa bencana yang terjadi merupakan bencana yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan dalam hal penetapan bencana untuk ditetapkan oleh kepala daerah merupakan bencana yang skala menengah tinggi. Oleh karena itu anggaran layanan dasar untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum dapat dilaksanakan.
- Layanan dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah memerlukan perencanaan daerah jangka panjang yang dituangkan dalam RPJMD Kota Palu, sehingga dalam hal pemenuhan nya memerlukan sinkronisasi program terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan.

Solusi:

- Pemenuhan Data Dasar pemenuhan Layanan SPM perlu adanya kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah Terkait dengan Pihak kelurahan sekota Palu ataupun Pihak lainnya agar dapat data dasar yang lebih efektif dan efisien dalam penganggaran.
- Apabila terdapat rencana Penyelenggaraan relokasi di Kota Palu sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah agar pemenuhan layanan SPM nya dapat dilaksanakan

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleg 3 (tiga) Perangkat daerah yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Adapun jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36
Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada tahun 2024, target pencapaian standar pelayanan minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan adalah 100% dengan rincian target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	4.000	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.400	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.300	100	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	100	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.752	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

3. Anggaran

Alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.38
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah		
	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.855.957.924 6.123.815.916	1,57 0,33
	c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.238.431.247	0,61
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM:		
	a. Satuan Polisi Pamong Praja	1.996.500.000	0,11
	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	475.475.700	0,03
	c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	662.792.700	0,04

- Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
4. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
5. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebanyak orang yang terdiri dari :

Tabel 3.39
Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Uraian	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	PNS	53	29	42
2	PPPK	-	-	30
3	PHL	358	30	123
4	LINMAS	100	-	
JUMLAH		511	59	195

- Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Tabel 3.40
Kondisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	24	8	9
3	Golongan III	26	17	27
4	Golongan IV	6	4	6
5	PPPK	-		30
JUMLAH		56	32	72

Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 pada komponen penerima layanan dasar dan mutu layanan minimal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.41
Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal (%)	Perangkat Daerah
		Target	Realisasi	%		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	4.000	4.000	100	94,76	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	2.400	2.400	100	100	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.300	2.300	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	50	100	100	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.752	1.752	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Selanjutnya untuk perhitungan pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada

perhitungan 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.42
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (%)		Capaian Mutu Layanan Minimal (%)		Total Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Realisasi	80%	Realisasi	20%		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	80	100	20	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	80	100	20	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	80	100	20	100	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	80	100	20	100	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	80	100	20	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas
99,65%

Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
• Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
• Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah sebesar 99,65% atau dalam kriteria **TUNTAS UTAMA**. Hal ini menandakan bahwa penerapan SPM belum bidangg urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian **100%**.

Selanjutnya dari sisi realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.43
Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Anggaran		(%)
1	Alokasi Anggaran Perangkat daerah			
d.	Satuan Polisi Pamong Praja	28.855.957.924	27.338.225.926	94,74
e.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.123.815.916	5.513.871.706	90,04
f.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.238.431.247	10.805.057.496	96,14
2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM:			
d.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.996.500.000	1.771.700.000	88,74
e.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	475.475.700	383.335.917	80,62
f.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	662.792.700	623.023.856	94,00

Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Selanjutnya untuk realisasi anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan langsung dengan penerapan SPM di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	%
Program :			
Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.996.500.000	1.771.700.000	88,74
Kegiatan :			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.396.500.000	1.174.200.000	84,08
Subkegiatan :			
1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.312.500.000	1.111.200.000	84,66
2. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	84.000.000	63.000.000	75,00

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	%
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	597.500.000	99,58
Subkegiatan : 1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	600.000.000	597.500.000	99,58
Sumber data: Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)			

Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait penerapan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	%
Program : Penanggulangan Bencana	475.475.700	383.335.917	80,62
Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3.500.000	0	0
Subkegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	3.500.000	0	0
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	135.650.400	80.500.400	59,01
Subkegiatan: Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	19.274.800	19.274.800	100
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	67.900.800	48.950.800	72,09
Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	28.474.800	11.824.800	41,52
Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	336.325.300	303.285.517	90,18
Subkegiatan: Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	199.206.400	199.206.400	100
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	137.118.900	104.079.117	75,90
Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)			

Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan penerapan SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	%
Program : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	662.792.700	623.023.850	94,00
Kegiatan Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	630.062.300	593.018.450	94,12
Subkegiatan: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.361.600	10.361.600	100
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	503.881.800	481.176.950	97,64
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	54.927.400	47.707.400	99,92
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25.198.000	18.079.000	98,08
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.693.500	35.693.500	95,01
Kegiatan: Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	5.610.000	4.485.000	79,95
Subkegiatan: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.020.000	990.000	100
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.590.000	3.495.000	86,44
Kegiatan: Investigasi Kejadian Kebakaran	11.600.000	10.000.000	86,21
Subkegiatan: Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	11.600.000	10.000.000	86,21
Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	15.520.400	15.520.400	100
Subkegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	15.520.400	15.520.400	100

Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

6. Kendala Permasalahan dan Solusi.

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan

- Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja.
- Masih banyaknya anggota Satpol PP yang belum mengikuti Diklatsar dan kegiatan pelatihan lainnya
- Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Solusi :

- Diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
- Diperlukan Diklatsar dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas yang belum mengikuti pelatihan
- Diperlukan Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Perkada terhadap masyarakat agar masyarakat paham serta mematuhi Perda dan Perkada yang berlaku; dan
- Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan :

- Belum Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam
- Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
- Sarana dan Prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi
- Kemampuan Personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD

Solusi :

- Adanya ketersediaan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat Kecamatan

- Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
- Perlu peningkatan dalam Sarana dan Prasarana
- Perlu peningkatan dalam Kemampuan Personil baik kualitas maupun kualitatif
- Penambahan jumlah personil PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional/bintek

c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permasalahan :

- Belum memadainya sarana dan prasarana yang didasarkan luas wilayah, kepadatan dan tingkat kesulitan Lokasi.
- Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga sulit untuk diwujudkan pemenuhan Sarana dan Prasarananya.
- Pelaksanaan penerapan SPM belum sesuai ketentuan sebagaimana yang diharapkan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Solusi :

- Kegiatan Pencegahan melalui edukasi (Edu-Damkar) berupa: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan pelatihan di luar kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu, Damkar Goes To School dan Edukasi Damkar secara Digital (Dadu Digital) yang secara khusus akan memenuhi kebutuhan Manajemen Proteksi Kebakaran Kota dalam lingkup Sumber Daya Manusia aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan serta Masyarakat Kota Palu.
- Kegiatan Kolaborasi Kerja penanganan bencana Kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya, dimana bentuk inovasi ini merupakan tindak lanjut dari 53 program daerah yaitu pembentukan Satgas Cepat Tanggap (Quick respons) dimana didalamnya terdapat kolaborasi kerja dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unit kerja lainnya baik itu instansi pemerintah daerah provinsi maupun instansi pusat.
- Menyusun Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota dan menyusun Tata Laksana Operasional Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.

- Memprioritaskan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang Terkait dengan bidang SPM dalam penyusunan Rencana Kerja pada Tahun selanjutnya.
- Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- Melaksanakan Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (*Rescue*);
- Peningkatan sarana prasarana pendukung pos pelayanan kebakaran termasuk sumber air, bak penampungan air, mobil pemadam kapasitas 3000-5000 Liter serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya.
- Sosialisasi dan bimbingan teknis dimasyarakat tentang proteksi dan penanggulangan kebakaran serta penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini. Diharapkan dengan adanya edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- Optimalisasi proteksi Kebakaran.

7. Urusan Sosial

2. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM urusan sosial didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47
Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada tahun 2024, target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.48
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	90	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	6	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	20	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	32	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	75	100

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

3. Anggaran

Dinas Sosial Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu sebesar Rp. 22.093.143.850,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 21.916.103.850,- dan belanja modal sebesar Rp. 177.040.000,-.

Tabel 3.49
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	22.093.143.850	1,20
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Sosial :	1.543.644.060	0,88
	- APBD Murni	1.543.644.060	0,88

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

4. Dukungan Personil

Jumlah seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Palu, sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.50
Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	4
3	Golongan III	25
4	Golongan IV	6
5	PPPK	8
Jumlah		43

Sumber data : Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan sosial Tahun 2024 pada komponen penerima layanan dan mutu layanan minimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.51
Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
		Target	Realisasi	%	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	90	90	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	6	6	100	100

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	20	20	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	32	32	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	75	1.614	100	100

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu, 2023 (data diolah)

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar menunjukkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Selanjutnya untuk perhitungan capaian SPM urusan sosial didasarkan pada rata-rata jumlah total dari 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan perumahan rakyat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (%)		Capaian Mutu Layanan Minimal (%)		Total Capaian (%)
		Realisasi	%	Realisasi	%	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di luar panti	100	80	100	20	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di luar panti	100	80	100	20	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	100	80	100	20	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	80	100	20	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	80	100	20	100

Capaian SPM Urusan Sosial
100%

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu, 2024 (data diolah)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM urusan sosial belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian **100%** atau dengan kriteria **TUNTAS PARIPURNA**.

Selanjutnya dari sisi realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kota Palu yang dialokasikan sebesar Rp. 22.093.143.850,- terealisasi sebesar Rp. 17.022.737.992,- atau sebesar 77,05% sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.53
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	Anggaran Perangkat daerah	22.093.143.850	17.022.737.992	77,05
2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Sosial :	1.543.644.060	1.397.006.878	0,88

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Selanjutnya, untuk realisasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan langsung dengan penerapan SPM bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.54
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	%
Program: Rehabilitasi Sosial			
Kegiatan: Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Dan Pengemis	764.229.450	617.725.100	80,83
Subkegiatan:			
Penyediaan Permakanan	20.400.000	12.240.400	60,00
Penyediaan Sandang	58.826.700	17.014.200	28,92
Penyediaan Alat Bantu	99.473.750	81.716.000	82,15
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Dan Sosial	585.529.000	506.754.500	86,55
Program: Penanganan Bencana			
Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota			
Subkegiatan:			
Penyediaan Makanan	413.013.900	412.926.900	99,98
Penyediaan Sandang	354.050.210	354.004.878	99,99
Pelayanan Dukungan Psikososial	12.350.000	12.350.000	100
Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	217.465.000	217.465.000	100

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	%
Subkegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	217.465.000	217.465.000	100

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi Sosial masih kurangnya berjalan, keluarga tidak mau menerima PPKS selesai penanganan,pemulangan PPKS terlantar yang tidak memiliki keluarga,dan kurangnya tempat penampungan PPKS terlantar/ darurat.
- Bahwa berdasarkan beberapa kasus yang sering terjadi dan kami respon dilapangan terutama masalah rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti dan lansia terlantar diluar panti,banyak klien yang kami temukan dilapangan tidak memiliki identitas sehingga kami memutuskan untuk merujuk ke Dinas Sosial Provinsi dan Balai Kementrian Sosial (Centra)wilayah Sulawesi Tengah tetapi ditengah perjalanan kami menemui kendala Klien Kami Tidak Diterima dengan alasan mereka (Klien yang kami rujuk)adalah PPKS yang tidak mandiri (mampu mengurus diri sendiri).kami sendiri dari Dinas Sosial Kota Palu juga memilik SOP tersendiri dalamn hal menampung PPKS terlantar yaitu selama 7 hari.yang kami bingung dan risaukan setelah 7 PPKS tersebut harus kemana,sementara di sisi lain lembaga yang menjadi rujukan kami menolak dengan alasannya sendiri.Dalam Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sudah jelas menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka dari itu, kami mohon bantuan dari bapak dan ibu untuk membantu masalah kami dalam hal intervensi anggaran kami dinaikkan dan intervensi ke Provinsi dan Kementrian Sosial yang menjadi pembina kami agar klien terlantar yang kami antarkan dapat diterima.

Solusi:

- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi social.
- Respon kasus/Penjangkauan Awal Asesmen, Manajemen, kasus, Intervensi, Rujukan, Monitoring/Evaluasi, Terminasi.

- 
- Perlunya percepatan sistim pemuktahiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - Perlunya partisipasi Potensi Sumber dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - Perlunya keinginan kuat dari berbagai pihak/stake holder dalam penanganan PSKS.

BAB 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang menjadi kewajiban pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah tentunya membutuhkan dukungan anggaran. Untuk dapat pengalokasian anggaran tentunya harus tertuang dalam program dan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Program dan kegiatan serta anggaran pendukung penerapan pencapaian SPM pada setiap bidang urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Urusan Pendidikan

Program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang dalam mendukung pelaksanaan SPM urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
Program : Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan : 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2023 (data diolah)

2. **Urusan Kesehatan**

Program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang dalam mendukung pelaksanaan SPM urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan: 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita 5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif 7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi 9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 10. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 11. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan: 1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2. Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Sumber data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (data diolah)

3. **Urusan Pekerjaan Umum**

Program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang dalam mendukung pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DI Daerah Kabupaten/Kota
SubKegiatan: 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan : 1. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2023 (Data diolah)

4. Urusan Perumahan Rakyat

Program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Program : Pengembangan Perumahan
Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Subkegiatan: 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

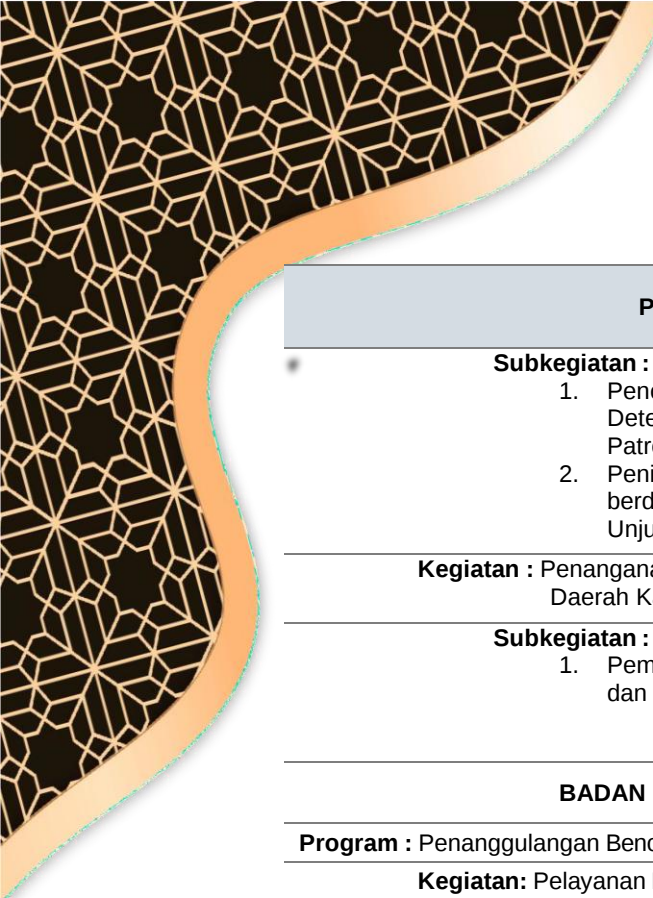
Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota PaluTahun 2024 (data diolah)

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program, Kegiatan dan Subkegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Subkegiatan : 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan : 1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program : Penanggulangan Bencana
Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Subkegiatan: 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Subkegiatan: 1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota 2. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota 3. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 4. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Subkegiatan: 1. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota 2. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kegiatan : Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan: 1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Subkegiatan: 1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 2. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran
Subkegiatan : 1. Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
Subkegiatan : 1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sumber data : 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

- 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
- 3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

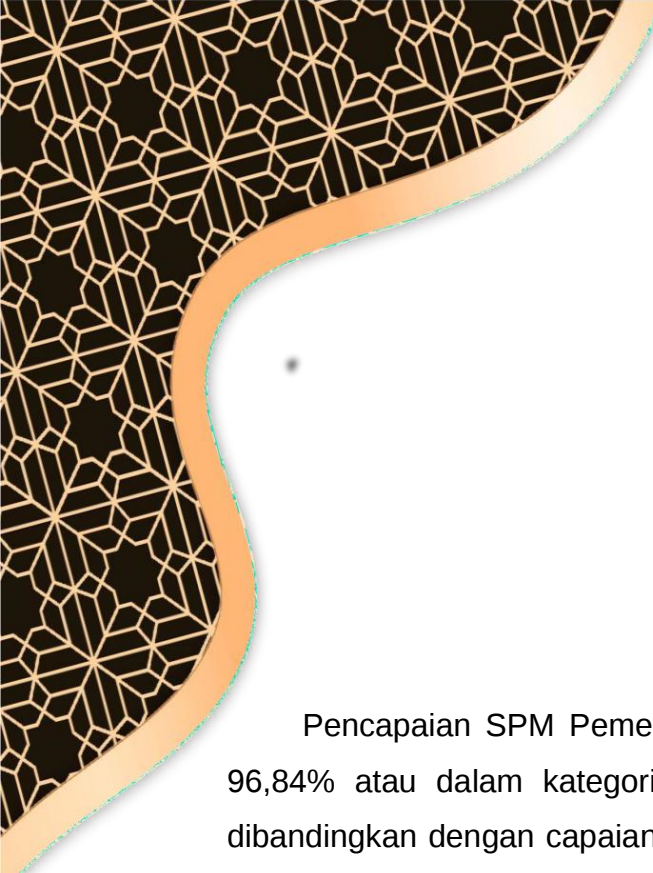
6. Urusan Sosial

Program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian SPM urusan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Urusan Sosial

Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Program : Rehabilitasi Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Dan Pengemis
Subkegiatan: 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Dan Sosial
Program : Penanganan Bencana
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota
Subkegiatan: 1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pelayanan Dukungan Psikososial
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Subkegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sumber data : Laporan SPM Dinas Sosial Kota PaluTahun 2024 (data diolah)



BAB 5

PENUTUP

Pencapaian SPM Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2024 adalah sebesar 96,84% atau dalam kategori Tuntas Utama. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 95,25%. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan perbaikan sekaligus peningkatan pencapaian SPM tahun berikutnya agar capaian dapat 100% atau Tuntas Paripurna. Selain itu, dalam laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu yang bersifat urusan wajib pelayanan dasar tahun anggaran 2023. Laporan ini merupakan upaya dalam perwujudan pelayanan publik yang oleh Pemerintah Kota Palu kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sangat disadari bahwa dalam laporan ini belum secara sempurna mampu menyajikan tingkat capaian SPM secara komprehensif, namun setidaknya Pemerintah Kota Palu telah berupaya secara maksimal dalam penyusunan dan penyajian laporan ini. Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa Laporan penerapan dan Penyelenggaraan SPM ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pusat terkait penyelenggaraan SPM di Daerah sehingga kebijakan SPM menjadi lebih aplikatif.

Demikian Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Palu Tahun 2024 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.